



# LAPORAN KINERJA

TAHUN  
2024

STASIUN KIPM BAUBAU

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

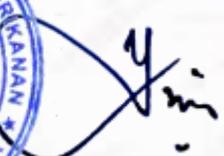
Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau (Stasiun KIPM Baubau) ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian Isi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Stasiun KIPM Baubau (Renstra Stasiun KIPM Baubau ) Tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 beserta realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun KIPM Baubau di masa mendatang.

Baubau, Januari 2025  
Kepala Stasiun KIPM Baubau



  
Yuni Irawati Wijaya



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
2 PERENCANAAN KINERJA .....	4
2.1 VISI DAN MISI .....	4
2.2 SASARAN KINERJA .....	4
3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	7
3.1 CAPAIAN KINERJA .....	7
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI .....	11
3.3 REALISASI ANGGARAN .....	25
4. PENUTUP .....	27
LAMPIRAN	



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2024 .....	3
---	---



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2024 .....	5
Tabel 2.	Capaian Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2024 .....	7
Tabel 3.	Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 .....	8
Tabel 4.	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 .....	11
Tabel 5.	Capaian IK 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) .....	13
Tabel 6.	Capaian IK 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	14
Tabel 7.	Capaian IK 3. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	15
Tabel 8.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) .....	17
Tabel 9.	Capaian IK 5. Indeks survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Baubau .....	19
Tabel 10.	Capaian IK 6. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau .....	20
Tabel 11.	Capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	21
Tabel 12.	Capaian IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	22
Tabel 13.	Capaian IK 9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	23



Tabel 14.	Capaian IK 10. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	24
Tabel 15.	Capaian IK 11. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	25
Tabel 16.	Capaian IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	25
Tabel 17.	Capaian IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	26
Tabel 18.	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 .....	27



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Baubau .	28
Lampiran 2. Bukti Dukung Pelaksanaan Sertifikasi Produk Kelauatan dan Perikanan Produksi Primer .....	30
Lampiran 3. Bukti Dukung Pelaksanaan Sertifikasi Produk Kelauatan dan Perikanan Produksi Pasca Panen.....	35
Lampiran 4. Bukti Dukung Pelaksanaan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau ....	41
Lampiran 5. Bukti Dukung Pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	80
Lampiran 6. Bukti Dukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Stasiun KIPM Baubau .....	81
Lampiran 7. Bukti Dukung Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	89
Lampiran 8. Bukti Dukung Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	90
Lampiran 9. Bukti Dukung Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	93
Lampiran 10. Bukti Dukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau .....	95
Lampiran 11. Bukti Dukung Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	98
Lampiran 12. Bukti Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	105
Lampiran 13. Bukti Dukung Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Baubau.....	106



Lampiran 14. Bukti Dukung Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM  
Baubau ..... 110



# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Baubau merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Baubau dituntut untuk melaksanakan secara, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Baubau. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata



Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Baubau mempunyai tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
- c) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- d) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- e) pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Jabatan Fungsional yang terdiri dari 8 orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (7 orang PNS dan 1 orang PPPK), 1 orang Fungsional APK APBN, 2 orang Fungsional Umum, 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 4 orang pegawai PJLP.



STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM BAUBAU TAHUN 2024



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Baubau 2024



# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. VISI DAN MISI

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu BPPMHKP menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 – 2024, yaitu : “Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya”

Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.

## 2.2. SASARAN KINERJA

Dengan adanya reorganisasi BPPMHKP, Stasiun KIPM Baubau menetapkan perubahan Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan per 1



Oktober 2024 yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Baubau seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Baubau	5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	3.36
		6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	86
		7.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	82
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	71
		9.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	93.76
		10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80
		12.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80



#### Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	220.000.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	113.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.549.821.000
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun 2024</b>		<b>3.882.821.000</b>

Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **3.645.714.000,-** (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*). Pada Triwulan III ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp **237.107.000,-** sehingga alokasi anggaran menjadi Rp **3.882.821.000,-** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*). Kemudian di Triwulan IV mendapatkan tambahan anggaran lagi sebesar Rp **95.000.000,-** (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga total anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp **3.977.821.000,-** (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).



# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Triwulan IV sebesar **115.56 % (Istimewa)**, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama 2024.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024

ASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2024	Realisasi
<b>SK1.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	<b>100</b>
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	<b>81,25</b>
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	<b>100</b>
<b>SK2.1</b>	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	<b>83,10</b>



<b>SK3.1</b>	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	3.36	<b>3.73</b>
		6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	86	<b>90.8</b>
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau	82	<b>81.45 (A)</b>
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	71	<b>87.5</b>
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	93.76	<b>93.80</b>
		10	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100	<b>100</b>
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80	<b>100</b>
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80	<b>84.34</b>
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80	<b>97.50</b>

Capaian untuk periode tahunan per triwulanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Baubau Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TW-1		TW-2		TW-3		TW-4	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Baubau	serti fikat	0	<b>0</b>	3	<b>4</b>	0	<b>1</b>		
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau	%							<b>70</b>	<b>100</b>



2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	Lokasi	2	2	0	0	2	2		
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau	%							70	81,25
3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Baubau	produk	0	0	0	0	0	1		
	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau	%							70	100
4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Baubau (UPI)	UPI	2	2	0	0	2	2		
	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau								70	83,10
5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Baubau	Nilai	84	90,82	84	91,79	84	92,86		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Baubau	Indeks							3.36	3,73



<b>6</b>	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Baubau	Indeks	0	0	81	<b>89,91</b>	0	0	86	<b>90,8</b>
<b>7</b>	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau	Nilai	0	0	0	0	0	0	82	<b>81,45</b>
<b>8</b>	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Baubau	Nilai	0,00	0	0	0	0	0		
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau	Nilai							71	<b>87,5</b>
<b>9</b>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Baubau	%	0	0	83	<b>93,25</b>	0	0	93,76	<b>94,72</b>
<b>10</b>	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Baubau	%	0	0	0	0	0	0	100	<b>100</b>
<b>11</b>	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Baubau	%	80	<b>100</b>	80	<b>100</b>	80	<b>100</b>	80	<b>100</b>
<b>12</b>	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau	%	0,00	0	0	0	0	0	80	<b>84,34</b>
<b>13</b>	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau	%	0,00	0	0	0	0	0	80	<b>97,50</b>



Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

N O	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
		CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	5	5	3	4
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	70	100
2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	-	-	2	2	2	2
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	70	81,25
3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Baubau	12	12	15	15	10	13
	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	70	100



	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Baubau (UPI)	3	2	3	3	2	2
<b>4</b>	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	70	83,10
	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Baubau	-	-	84	91,29		
<b>5</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	3.36	3,73
<b>6</b>	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Baubau	72	80	83	90,33	86	90,8
<b>7</b>	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau	90	90	90,39	84,76	82	81,45
<b>8</b>	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	90	84,16	85,66		



	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	71	87,5
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Baubau	90	90	96,62	96,42	93,76	94,72
10	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	-	-	100	100
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Baubau	82	75	100	75	80	100
12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	79,56	78,26	80	84,34
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau	-	-	97,50	100	80	97,50



### 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pimpinan yang baru yang ditandatangani pada 1 Oktober 2024 maka untuk Triwulan IV terdapat beberapa perbedaan dengan Triwulan sebelumnya. Capaian IK pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut.

*Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan*

#### **IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku



Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Tabel 5. Capaian IK 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	100	142,86

Capaian untuk Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau adalah 142,86% dimana target IK ini adalah 70 dengan realisasi sebanyak 100%. Capaian ini didapatkan berdasarkan kegiatan identifikasi dan sosialisasi terkait kegiatan sektor primer yang meliputi 6 (enam) sertifikasi yaitu sertifikasi perikanan budidaya CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap CPIB di kapal.

**IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau(%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi



kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Tabel 6. Capaian IK 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	81,25	116,07

Pada Triwulan IV kegiatan ini terealisasi berdasarkan capaian Sertifikasi HACCP yang diterbitkan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) sertifikat HACCP penambahan ruang lingkup produk *salted jellyfish* dan 6 (enam) capaian Monev HACCP milik PT. Triko Bina Nusantara serta 6



(enam) capaian Monev HACCP milik PT. Arta Mina Jaya. Sedangkan capaian untuk sertifikasi SKP dan SPDI belum ada di tahun 2024 ini.

**IK 3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)**

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Tabel 7. Capaian IK 3. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau	70	100	142,85



Untuk Tahun 2024 capaian IKU 3. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau adalah 2 lokasi dengan target 2 lokasi. Capaian ini didapatkan dari laporan akhir kegiatan Inpres 01 tahun 2017 yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan triwulan III dengan pelaksanaan sesuai target sehingga capaiannya 100%.

*Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar*

**IK 4. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;



3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 8. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	83,10	118,7

Target kinerja untuk IKU Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:



1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar **83,10**.

Dari capaian tersebut maka persentase capaian realisasi terhadap target untuk IKU Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau adalah sebesar **118,7 %**

*Sasaran Strategis : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Baubau*

#### **IK 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Baubau**

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.



Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Stasiun KIPM Baubau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: [https://ptsp.kkp.go.id/skm/login\\_Aplikasi](https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi) yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Tabel 9. Capaian IK 5. Indeks survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Indeks survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Baubau	3,36	3,73	111 <b>SANGAT BAIK</b>

Untuk Tahun 2024 ini, Stasiun KIPM Baubau mendapatkan nilai IKM sebesar **3,73** dari target sebesar 3,36, sehingga dapat disimpulkan Stasiun KIPM Baubau memperoleh nilai **SANGAT BAIK (111%)** dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya semoga kedepannya nilai ini dapat dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan karena semakin tinggi nilainya berarti kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima semakin baik.

#### IK 6. Indeks Profesional ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan



evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2024, target indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau sebesar 86 % dan pengukurannya akan dilakukan setiap semester dalam setiap tahunnya.

Tabel 10. Capaian IK 6. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau	<b>86</b>	<b>90,8</b>	<b>105,6</b>

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2024, target indeks profesionalitas ASN tahunan lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau sebesar **86** dengan capaian per semester dan pada semester ini telah melebihi target dengan capaian 90,8 atau 105,6 % dari target.

#### **IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau**

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau (data capaian dan pelaporan) kinerja satker Stasiun KIPM Baubau dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian. Bobot untuk setiap komponen dalam penilaian setiap rekonsiliasi kinerja adalah sebagai berikut : - Kepatuhan sebesar 30% - Kesesuaian sebesar 30 % - Ketercapaian sebesar 40%.



Tabel 11. Capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau	82	81,45	99,33

Untuk capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau ini adalah capaian tahunan dan nilai yang didapatkan adalah 81,45 dari target 82 sehingga untuk IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau ini tidak tercapai. Hasil ini akan menjadi catatan yang kedepannya akan ada perbaikan sehingga diharapkan di tahun-tahun kedepan akan lebih baik.

#### **IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Baubau**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.



Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA 50

Tabel 12. Capaian IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau	71	87,5	123,24

Nilai capaian untuk IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau ini merupakan capaian tahunan dengan target **71** dan realisasi di tahun ini adalah **87,5** sehingga capaian terhadap target adalah **123,24%**.

#### **IK 9 . Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Nilai Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya,



Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus dari perhitungan tersebut

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

sebagai berikut:

$$I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

dengan

Keterangan:

NK : Nilai kinerja

I : Nilai aspek implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK : Pencapaian keluaran

NE : Nilai efisiensi

WE : Bobot efisiensi

CH : Capaian hasil

WI : Bobot aspek implementasi

WCH : Bobot capaian hasil

WP : Bobot penyerapan anggaran

WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

WPK : Bobot pencapaian keluaran

Tabel 13. Capaian IK 9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup STASIUN KIPM Baubau	93,76	94,72	101

Nilai capaian untuk IK 9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau ini adalah capaian semesteran dan tahunan sehingga akan ada realisasi pada triwulan II dan IV dengan target tahunan 93,76. Untuk triwulan IV ini capaiannya adalah 94,72 sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 101% dan ini merupakan capaian tahun 2024.



#### **IK 10. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Baubau**

Batas temuan tertinggi nilai temuan LHP BPK adalah dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait perbaikan kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 14. Capaian IK 10. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau	100	100	100

Pada kurun waktu pelaporan tidak ada pemeriksaan oleh BPK sehingga realisasi tahun 2024 untuk Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau adalah **100%**.

#### **IK 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau**

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Relu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:



$$\%_{kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar **80 %** dengan realisasi di Triwulan IV sebesar **100 %** sehingga persentase capaian tahun 2024 terhadap target sebesar **120%**.

Tabel 15. Capaian IK 11. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Stasiun KIPM Baubau	80	100	120

#### IK12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada Stasiun KIPM Baubau telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Tabel 16. Capaian IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau	80	84,34	105,4



Sesuai rincian target Indikator Kinerja, capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Baubau merupakan capaian tahunan sebesar **84,34** dari target sebesar **80**, sehingga persentase capaian terhadap target adalah **105,4%**.

### **IK13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan.

Tabel 17. Capaian IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau	80	97,5	121,87

Sesuai rincian target Indikator Kinerja, capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Baubau merupakan capaian tahunan sebesar **80** dan capaian sebesar **97,5** sehingga persentase capaian terhadap target adalah **121,87%**.

### **3.3. REALISASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Baubau pada tahun anggaran (T.A) 2024 setelah mendapatkan tambahan anggaran Rp **95,000,000** (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) adalah sebesar Rp **3,977,821,000** (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Baubau pada Triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp. **3,782,864,913** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus*



*Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah* ) atau sebesar **95,10 %** (*Sembilan Puluh Lima Koma Sepuluh*). Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Baubau T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 17.

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	2,074,167,000	1,965,929,639	94.78
2.	Belanja Barang	1,903,654,000	1,816,935,274	95.44
3.	Belanja Modal	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,977,821,000</b>	<b>3,782,864,913</b>	<b>95.10</b>



# PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024, Stasiun KIPM Baubau telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dengan telah terealiasasinya semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 13 Indikator Kinerja Utama, Stasiun KIPM Baubau tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Stasiun KIPM Baubau kepada Kepala BPPMHKP dan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Baubau



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuni Irawati Wijaya**  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan

**Ishartini**

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Baubau

**Yuni Irawati Wijaya**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Baubau	5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	3.36
		6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	86
		7.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	82
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	71
		9.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	93.76
		10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80
		12.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	80

Lampiran 2. Bukti Dukung Pelaksanaan Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Produksi Primer

**LAPORAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN PRODUKSI PRIMER**



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2024**

## A. PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SISJAMU adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Perkembangan dalam bidang informasi, berdampak pada dunia perdagangan, yang menuntut adanya efisiensi dan epektifitas pelayanan, termasuk layanan sertifikasi yang cepat dan efisien (*on-time and on-line*). Peningkatan kualitas layanan sertifikasi yang cepat dan efisien diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia. Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan ketelusuran produk harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi produk dari hulu ke hilir, Pusat pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen menerapkan standar dan acuan layanan sertifikasi produk Perikanan yang terdiri dari sertifikasi produk perikanan Primer dan Pasca Panen. Standar dan acuan layanan sertifikasi produk perikanan Primer terdiri dari: CBIB, CPIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB. Sedangkan standar dan acuan layanan sertifikasi produk perikanan pasca panen, terdiri dari SKP, HACCP dan SPDI.

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan standar dan acuan layanan sertifikasi produk primer yang terintegrasi dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, maka SKIPM Baubau melakukan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan atau sertifikasi produk kelautan dan perikanan primer di kota dan kabupaten lingkup SKIPM Baubau.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan sertifikasi produk kelautan dan perikanan produksi primer lingkup SKIPM Baubau Tahun 2024 terdiri dari sertifikasi CBIB, CPIB, CPIB Kapal (sertifikasi CPPIB, CPOIB dan CDOIB belum ada di wilayah Sulawesi Tenggara), dimana capaian dari masing-masing kegiatan sebagai berikut ;

### 1. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) adalah rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembenihan ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

Jumlah sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) yang telah terbit dan masih berlaku di masing-masing Kota/Kabupaten lingkup SKIPM Baubau seperti data berikut ini :

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Unit Pembesaran Ikan	Sudah Sertifikasi CBIB	Belum Sertifikasi CBIB
Sulawesi Tenggara	Buton	88	7	81
Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	144		144
Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	1,366		1,366
Sulawesi Tenggara	Buton Utara	385	13	385
Sulawesi Tenggara	Kota BauBau	420		420
Sulawesi Tenggara	Muna	1,831		1,831
Sulawesi Tenggara	Muna Barat	198		198
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	669	43	626
<b>Total</b>		<b>5,101</b>	<b>63</b>	<b>5,038</b>

### 2. Sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

Sertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) adalah rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembenihan ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik).

Adapun data pelaku usaha terkait sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) lingkup SKIPM Baubau sebagai berikut;

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Unit Pembenihan Ikan (unit)	Sudah Sertifikasi CPIB	Belum Sertifikasi CPIB
Sulawesi Tenggara	Buton	0	0	0
Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	0	0	0
Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	0	0	0
Sulawesi Tenggara	Buton Utara	0	0	0
Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1	0	1
Sulawesi Tenggara	Muna	0	0	0
Sulawesi Tenggara	Muna Barat	0	0	0
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	6	6	0
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

### 3. Sertifikasi CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik) di Kapal

Sertifikat CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik) di Kapal adalah Sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Data pelaku usaha terkait sertifikasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) di Kapal lingkup SKIPM Baubau sebagai berikut;

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Kapal Penangkap/ Penampung Ikan (unit)	Sudah Sertifikasi CPIB Kapal	Belum Sertifikasi CPIB Kapal
Sulawesi Tenggara	Buton	2,047	30	2,017
Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	4,714	0	4,714
Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	3,731	0	3,731
Sulawesi Tenggara	Buton Utara	3,354	0	3,354
Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1,661	0	1,661
Sulawesi Tenggara	Muna	4,231	0	4,231
Sulawesi Tenggara	Muna Barat	2,161	0	2,161
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	3,449	0	3,449
<b>Total</b>		<b>25,348</b>	<b>30</b>	<b>25,318</b>

### C. PENUTUP

Kegiatan sertifikasi produk kelautan dan perikanan produksi primer lingkup SKIPM Baubau dilakukan sebagai penjaminan mutu hasil perikanan hulu hilir yang akan dilaksanakan oleh BPPMHKP dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari Instansi terkait dan *stakeholders* lainnya.

Sehubungan dengan IKU 1 dari sasaran kinerja organisasi yakni persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%), dengan rumus :

$$\%X = \frac{A + B + C}{xn} \times 100 \%$$

%x = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah unsur pembentuk, dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT

Sehingga pencapaian IKU 1 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{1+1+1}{3} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$



Mengetahui,  
Kepala SKIPM Baubau

Irawati Wijaya, S.Pi, M.P

Baubau, 31 Desember 2024

Ketua Tim Kerja

Abdul Syukur Yasin, S.Pi.,M.Si

Lampiran 3. Bukti Dukung Pelaksanaan Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Produksi Pasca Panen

**LAPORAN PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PRODUKSI PASCA PANEN**



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2024**

## A. Pendahuluan

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SISJAMU adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Perkembangan dalam bidang informasi, berdampak pada dunia perdagangan, yang menuntut adanya efisiensi dan epektifitas pelayanan, termasuk layanan sertifikasi yang cepat dan efisien (*on-time and on-line*). Peningkatan kualitas layanan sertifikasi yang cepat dan efisien diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia. Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan ketelusuran produk harus diimplementasikan dan terintegrasi dalam sistem sertifikasi hasil perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi produk dari hulu ke hilir, Pusat pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen menerapkan standar dan acuan layanan sertifikasi produk Perikanan yang terdiri dari sertifikasi produk perikanan Primer dan Pasca Panen. Standar dan acuan layanan sertifikasi produk perikanan Primer terdiri dari: CBIB, CPIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB. Sedangkan standar dan acuan layanan sertifikasi produk perikanan Pasca Panen, terdiri dari : SKP, HACCP dan SPDI.

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan standar dan acuan layanan sertifikasi produk pasca panen yang terintegrasi dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, maka SKIPM Baubau melakukan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan atau sertifikasi produk kelautan dan perikanan pasca panen di seluruh wilayah kerja.

## B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan sertifikasi produk kelautan dan perikanan pasca panen lingkup SKIPM Baubau Tahun 2024 terdiri dari sertifikasi HACCP, SKP, dan SPDI/CPIB Suplier, dimana capaian dari masing-masing kegiatan sebagai berikut ;

## 1. Sertifikasi HACCP

Sertifikasi HACCP ruang lingkup pada UPI Tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan inspeksi/monev penerapan HACCP ruang lingkup pada UPI seperti pada data berikut ;

No	Nama UPI	Alamat	Ruang Lingkup	Grade HACCP
1	PT. Triko Bina Nusantara	Desa Dongkala, Kec.Pasarwajo, Kab.Buton, Sulawesi Tenggara Telp. (62) 81322706888	1. Fresh Demersal Fish	B
			2. Frozen Cephalopods	B
			3. Frozen Demersal Fish	B
			4. Frozen Pelagic Fish	B
			5. Frozen Shrimp	B
			6. Frozen Tuna	B
2	PT. Arta Mina Jaya	Jl.Poros Wandoka, Lingkungan Antapia, Kel.Wandoko Utara, Kec.Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara Telp. (62) 85256601317	1. Fresh Tuna	B
			2. Frozen Tuna	B
			3. Frozen Cephalopods	B
			4. Frozen Pelagic Fish	B
			5. Fresh Demersal Fish	B
			6. Frozen Demersal Fish	B

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat 1 permohonan sertifikasi HACCP dengan penambahan ruang lingkup Ubur-ubur asin, sehingga capaian sertifikasi HACCP Tahun 2024 SKIPM Baubau sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Target 2024	Jumlah Sertifikat HACCP yang terbit 2024	Jumlah Sertifikat HACCP yang dilaksanakan Monev 2024	Total Sertifikasi HACCP	Capaian (%)
1	Sertifikasi HACCP	8	1	12	13	162,50

## 2. Sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)

Pada tahun 2024 belum ada pengguna jasa yang mengajukan permohonan Sertifikat SKP sehingga anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini digunakan untuk

mengidentifikasi jumlah sertifikat SKP yang telah terbit dan masih berlaku di masing-masing Kota/Kabupaten lingkup SKIPM Baubau seperti data berikut ini ;

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Unit Pengolahan Ikan	Sudah sertifikasi SKP	Belum sertifikasi SKP
Sulawesi Tenggara	Buton	88	3	85
Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	25	0	25
Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	37	0	37
Sulawesi Tenggara	Buton Utara	32	0	32
Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	116	0	116
Sulawesi Tenggara	Muna	81	0	81
Sulawesi Tenggara	Muna Barat	85	0	85
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	220	3	217
<b>Total</b>		<b>684</b>	<b>6</b>	<b>678</b>

### 3. Sertifikasi SPDI (Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan)

Sertifikat SPDI (Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan) adalah sertifikasi baru yang diterbitkan oleh BPPMHKP, sehingga pada tahun 2024 ini kami hanya melakukan sosialisasi tentang apa itu sertifikasi SPDI, manfaat dan tata cara pengajuan permohonan. Sosialisasi ini di masing-masing Kota/Kabupaten lingkup SKIPM Baubau yang bersama-sama dilakukan saat identifikasi dan sosialisasi sertifikasi SKP.

Hingga akhir tahun 2024 belum ada pengajuan permohonan sertifikasi SPDI yang berarti belum ada sertifikat SPDI yang terbit. Pada masa transisi pelaksanaan SPDI telah dilakukan sertifikasi CPIB Suplier lingkup SKIPM Baubau. Adapun data pelaku usaha terkait sertifikasi SPDI dan capaian sertifikasi CPIB Suplier sebagai berikut;

a. Pelaku usaha sertifikasi SPDI

Provinsi	Kabupaten	Jumlah Supplier/ mini plant (Unit)	Sudah sertifikasi SPDI	Belum sertifikasi SPDI
Sulawesi Tenggara	Buton	181	0	181
Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	47	0	47
Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	289	0	289
Sulawesi Tenggara	Buton Utara	227	0	227
Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	148	0	148
Sulawesi Tenggara	Muna	646	0	646
Sulawesi Tenggara	Muna Barat	115	0	115
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	298	0	298
<b>Total</b>		<b>1.951</b>	<b>0</b>	<b>1.951</b>

b. Capaian Sertifikasi CPIB Suplier

No	Nama Kegiatan	Target 2024	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang terbit 2024	Capaian (%)
1	Sertifikasi CPIB Suplier	5	5	100

C. Penutup

Kegiatan sertifikasi produk kelautan dan perikanan pasca panen lingkup SKIPM Baubau dilakukan sebagai penjaminan mutu hasil perikanan hulu hilir yang akan dilaksanakan oleh BPPMHKP dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari Instansi terkait dan *stakeholders* lainnya.

Sehubungan dengan IKU 2 dari sasaran kinerja organisasi yakni persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%), dengan rumus :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

%x = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar pangan

A = Persentase penerbitan sertifikat HACCP ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di UPI skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP-SSOP

xn = Jumlah unsur pembentuk, dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yang ada di UPT

Sehingga pencapaian IKU 2 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{162,5 + 0}{2} \times 100\% \\ &= 81,25 \%\end{aligned}$$



Mengetahui,  
Kepala SKIPM Baubau

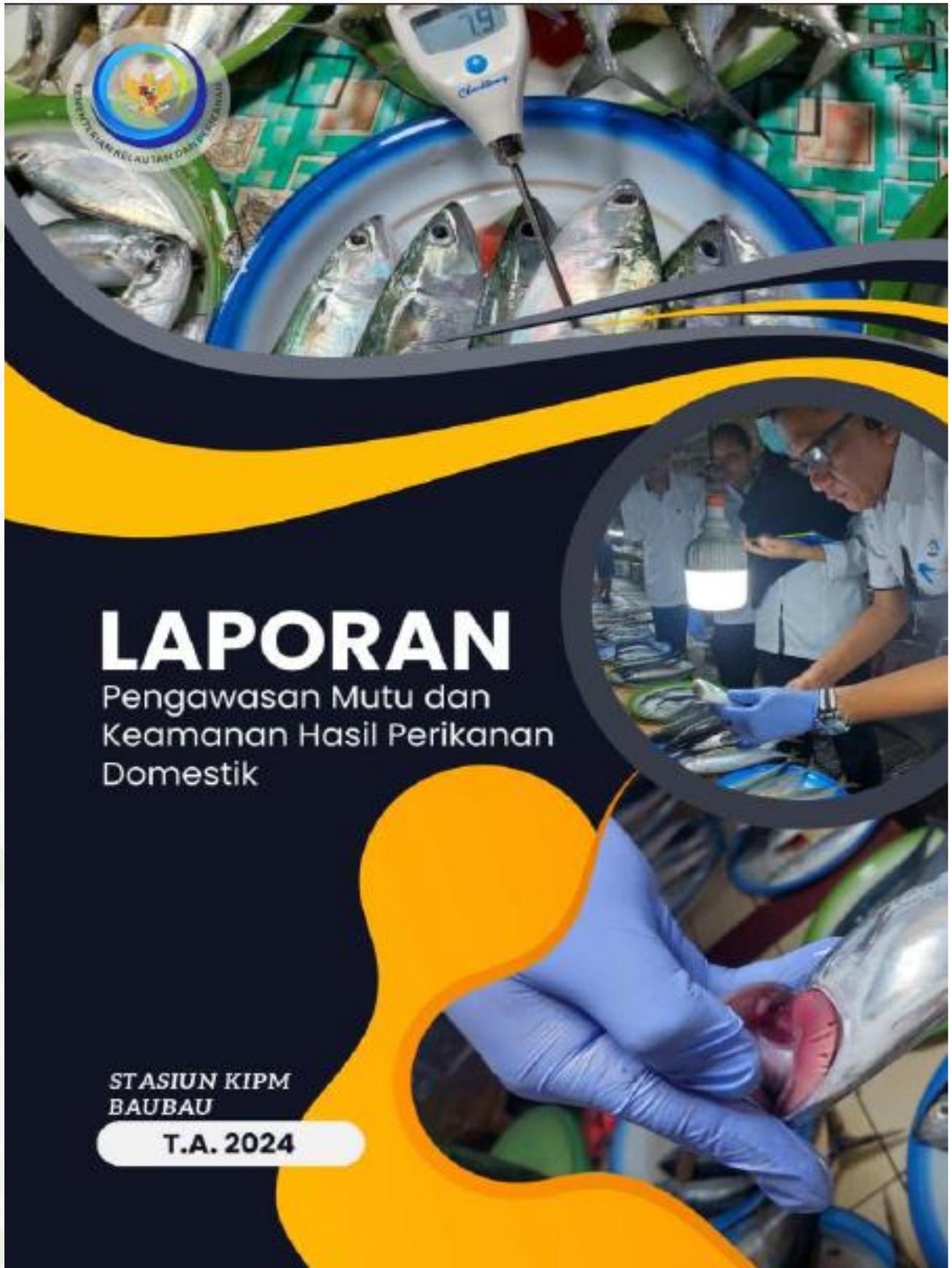
Hani Pratiwi Wijaya, S.Pi, M.P

Baubau, 31 Desember 2024

Ketua Tim Kerja

Supriadi, A.Md.Pi

Lampiran 4. Bukti Dukung Pelaksanaan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Baubau





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat (Implementasi Inpres 01) Tahun 2024 ini.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat yang berada di Wilayah Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk memastikan ikan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan terbebas dari bahan-bahan berbahaya, bahan kimia dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu guna kesempurnaan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu didalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat di Wilayah Kerja SKIPM Baubau. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi terkait kondisi kesegaran ikan di sentra penyedia pangan sehat yang ada di daerah Kota Baubau dan sekitarnya.

Mengetahui  
Kepala,

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP

Baubau, Desember 2024  
Tim Pelaksana

---

Stasiun KIPM Baubau



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	3
2.1 Pelaksana.....	3
2.2 Waktu dan Lokasi.....	3
2.3 Hasil.....	3
a. Hasil pengamatan lokasi.....	3
b. Pengambilan contoh.....	4
c. Hasil pengujian pengambilan contoh.....	5
2.4 Capaian.....	9
2.5 Permasalahan.....	9
2.6 Rencana Tindak Lanjut.....	10
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran/Rekomendasi.....	11
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	13
<b>Lampiran-lampiran</b> .....	14



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi higiene.....	3
Tabel 2. Hasil pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi higiene.....	4
Tabel 3. Data jenis contoh yang diperoleh pada lokasi kegiatan.....	4
Tabel 4. Hasil pengujian pengambilan contoh di PPI Wameo .....	6
Tabel 5. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Wameo .....	6
Tabel 6. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Karya Nugraha .....	6
Tabel 7. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Lowu-lowu .....	7
Tabel 8. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Sabho.....	7
Tabel 9. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Takimpo .....	8





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Pangan ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau (SKIPM Baubau) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis perpanjangan tangan dari otoritas kompeten BKIPM KKP berkewajiban untuk mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat maka SKIPM Baubau memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat.

Kegiatan pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat yang dilakukan di SKIPM Baubau berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat. Kegiatan tersebut dilakukan di pasar ikan tradisional atau sentra produksi ikan yang berada dalam lingkup wilayah kerja SKIPM Baubau. Parameter yang diuji dalam kegiatan ini adalah organoleptik, pengujian ALT, pengujian bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella* sp. dan pengujian formalin. Pengujian tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.



## 1.2 Tujuan

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Melakukan pengawasan mutu hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat;
2. Memberikan data dan informasi kondisi hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2017.





## BAB II PELAKSANAAN

### 2.1 Pelaksana

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilaksanakan oleh petugas SKIPM Baubau yang terdiri dari Inspektur Mutu, staff administrasi dan PPNN. Dalam pelaksanaannya juga melibatkan instansi terkait seperti Loka POM Kota Baubau, Dinas Perikanan Kota Baubau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau dan Dinas Perikanan Kab. Buton.

### 2.2 Waktu dan Lokasi

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan tidak 2 (dua) kali selama tahun 2024 yaitu Bulan Maret dan Bulan September. Lokasi yang menjadi target kegiatan pengendalian adalah di Kota Baubau dan Kabupaten Buton. Lokasi usaha (lokus) untuk Kota Baubau terdiri dari 4 lokus, yaitu Pelabuhan Perikanan Wameo, Pasar Tradisional Wameo, Pasar Tradisional Karya Nugraha dan Pasar Tradisional Lowu-lowu. Lokasi usaha untuk Kab. Buton terdiri dari 2 lokus, yaitu Pasar Tradisional Sabho dan Pasar Tradisional Takimpo.

### 2.3 Hasil

#### a. Hasil pengamatan lokasi

Pengamatan lokasi pada Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik semester I pada kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene dengan kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi hygiene

No	Lokasi	Lokasi Usaha (Lokus)	Kriteria
1.	Kota Baubau	a. PPI Wameo	Cukup
		b. Pasar Tradisional Wameo	Kurang
		c. Pasar Tradisional Karya Nugraha	Cukup
		d. Pasar Tradisional Lowu-lowu	Cukup
2.	Kab. Buton	a. Pasar Tradisional Sabho	Baik
		b. Pasar Tradisional Takimpo	Baik

Sumber: Data Primer, 2024



Sedangkan lokasi pada Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik semester II pada kondisi sarana prasarana dan sanitasi higiene dengan kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil pengamatan kondisi sarana prasarana dan sanitasi higiene**

No	Lokasi	Lokasi Usaha (Lokus)	Kriteria
1.	Kota Baubau	a. PPI Wameo	Cukup
		b. Pasar Tradisional Wameo	Cukup
		c. Pasar Tradisional Karya Nugraha	Cukup
		d. Pasar Tradisional Lowu-lowu	Cukup
2.	Kab. Buton	a. Pasar Tradisional Sabho	Baik
		b. Pasar Tradisional Takimpo	Baik

Sumber: Data Primer, 2024

#### b. Pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan dengan cara pelaksana kegiatan langsung ke lapangan untuk melihat ikan-ikan yang menjadi target. Pengambilan contoh dilakukan dengan steril dan dimasukkan dalam wadah steril serta disimpan ke dalam wadah penyimpanan dan suhu dipertahankan sesuai karakteristik awal produk yaitu dalam kondisi segar. Contoh diberi identitas yang memuat jenis ikan, tanggal dan lokasi pengambilan sampel. Contoh dipastikan disimpan dan dibawa dalam kondisi baik sampai ke laboratorium.

Data jenis contoh yang diperoleh pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Data Jenis Contoh yang diperoleh pada Lokasi Kegiatan**

No	Lokasi	Semester I	Semester II
<b>Kota Baubau</b>			
1.	PPI Wameo	- Ikan kembung	- Ikan kembung
		- Ikan tongkol	- Ikan tongkol
		- Ikan cakalang	- Ikan cakalang
		- Ikan baby tuna	- Ikan baby tuna
		- Ikan layang	- Ikan layang



2.	Pasar Tradisional Wameo	- Ikan baby tuna	- Ikan baby tuna
		- Ikan tongkol	- Ikan tongkol
		- Ikan kembung	- Ikan kembung
		- Ikan layang	- Ikan layang
		- Ikan cakalang	- Ikan cakalang
3.	Pasar Tradisional Karya Nugraha	- Ikan baby tuna	- Ikan baby tuna
		- Ikan tongkol	- Ikan tongkol
		- Ikan layang	- Ikan layang
		- Ikan kembung	- Ikan kembung
		- Ikan cakalang	- Ikan cakalang
4.	Pasar Tradisional Lowu-lowu	- Ikan tongkol	- Ikan tongkol
		- Ikan baby tuna	- Ikan baby tuna
		- Ikan cakalang	- Ikan cakalang
		- Ikan layang	- Ikan layang
		- Ikan kembung	- Ikan kembung
<b>Kab. Buton</b>			
5.	Pasar Tradisional Sabho	- Ikan kembung	- Ikan kembung
		- Ikan layang	- Ikan layang
		- Ikan baby tuna	- Ikan baby tuna
		- Ikan tongkol	- Ikan tongkol
		- Ikan cakalang	- Ikan cakalang
6.	Pasar Tradisional Takimpo	- Ikan kembung	- Ikan kembung
		- Ikan tongkol	- Ikan tongkol
		- Ikan cakalang	- Ikan cakalang
		- Ikan layang	- Ikan layang
		- Ikan baby tuna	- Ikan baby tuna

Sumber: Data Primer, 2024

### c. Hasil pengujian pengambilan contoh

Pengujian contoh untuk Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan di Laboratorium SKIPM Baubau. Parameter pengujian yang dilakukan untuk sampel kegiatan ini terdiri dari pengujian organoleptik untuk mengetahui kesegaran ikan, pengujian mikrobiologi (*ALT*, *E.coli*, *Salmonella*) untuk mengetahui kontaminasi bakteri patogen dan pengujian formalin untuk mengetahui bahan kimia berbahaya yang sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan. Hasil pengujian terhadap sampel Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik adalah sebagai berikut.

**Stasiun KIPM Baubau**



**Tabel 4. Hasil pengujian pengambilan contoh di PPI Wameo**

S M T	LOKASI	JENIS IKAN	HASIL PENGUJIAN				
			Orga nolep tik	ALT (Koloni/g)	E.coli (APM/g)	Salmonella (per 25 g)	Formalin (mg/L)
I	PPI Wameo (01 Maret 2024)	1. Ikan kembung	7	$1,75 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$< 2,5 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan cakalang	7	$< 2,5 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan baby tuna	7	$8,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan layang	7	$1,7 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
II	PPI Wameo (17 Sept. 2024)	1. Ikan kembung	7	$3,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$3,8 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan cakalang	7	$5,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan baby tuna	7	$6,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan layang	7	$4,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif

Keterangan:

Hasil pengujian melebihi ambang batas persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013)

**Tabel 5. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Wameo**

S M T	LOKASI	JENIS IKAN	HASIL PENGUJIAN				
			Organo leptik	ALT (Koloni/g)	E.coli (APM/g)	Salmonella (per 25 g)	Formalin (mg/L)
I	Pasar Wameo (01 Maret 2024)	1. Ikan baby tuna	7	$9,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$5,5 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan kembung	7	$4,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan layang	7	$4,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan cakalang	7	$8,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
II	Pasar Wameo (17 Sept. 2024)	1. Ikan baby tuna	7	$9,0 \times 10^3$	3,0	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$7,0 \times 10^3$	9,2	Negatif	Negatif
		3. Ikan kembung	7	$8,8 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan layang	7	$1,3 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan cakalang	7	$8,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif

Keterangan:

Hasil pengujian melebihi ambang batas persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013)

**Tabel 6. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Karva Nugraha**

S M T	LOKASI	JENIS IKAN	HASIL PENGUJIAN				
			Organo leptik	ALT (Koloni/g)	E.coli (APM/g)	Salmonella (per 25 g)	Formalin (mg/L)
I	Pasar Karva Nugraha (04 Maret 2024)	1. Ikan baby tuna	7	$3,6 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$9,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan layang	7	$8,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan kembung	7	$1,6 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan cakalang	7	$7,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif



II	Pasar Karya Nugraha (20 September 2024)	1. Ikan baby tuna	7	$1,0 \times 10^4$	3,6	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$1,3 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan layang	7	$8,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan kembung	7	$4,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan cakalang	7	$5,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif

Keterangan:

Hasil pengujian melebihi ambang batas persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013)

Tabel 7. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Lowu-lowu

S M T	LOKASI	JENIS IKAN	HASIL PENGUJIAN				
			Organo leptik	ALT (Koloni/g)	E.coli (APM/g)	Salmonella (per 25 g)	Formalin (mg/L)
I	Pasar Lowu-lowu (05 Maret 2024)	1. Ikan tongkol	7	$3,5 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan baby tuna	7	$2,6 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan cakalang	7	$1,6 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan layang	7	$1,7 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan kembung	7	$1,1 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
II	Pasar Lowu-lowu (03 Sept. 2024)	1. Ikan tongkol	7	$< 2,5 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan baby tuna	7	$7,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan cakalang	7	$6,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan layang	7	$1,2 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan kembung	7	$9,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif

Keterangan:

Hasil pengujian melebihi ambang batas persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013)

Tabel 8. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Sabho

S M T	LOKASI	JENIS IKAN	HASIL PENGUJIAN				
			Organo leptik	ALT (Koloni/g)	E.coli (APM/g)	Salmonella (per 25 g)	Formalin (mg/L)
I	Pasar Sabho (06 Maret 2024)	1. Ikan kembung	7	$2,4 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan layang	7	$1,7 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan baby tuna	7	$1,1 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan tongkol	7	$1,4 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan cakalang	7	$2,2 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
II	Pasar Sabho (4 Sept. 2024)	1. Ikan kembung	7	$1,7 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan layang	7	$2,1 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan baby tuna	7	$3,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan tongkol	7	$4,0 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan cakalang	7	$7,0 \times 10^4$	< 3	Positif	Negatif

Keterangan:

Hasil pengujian melebihi ambang batas persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013)



**Tabel 9. Hasil pengujian pengambilan contoh di Pasar Takimpo**

S M T	LOKASI	JENIS IKAN	HASIL PENGUJIAN				
			Organoleptik	ALT (Koloni/g)	E.coli (APM/g)	Salmonella (per 25 g)	Formalin (mg/L)
I	Pasar Takimpo (06 Maret 2024)	1. Ikan kembung	7	$9,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$1,32 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan cakalang	7	$1,5 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan layang	7	$1,1 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		5. Ikan baby tuna	7	$8,4 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
II	Pasar Takimpo (04 Sept 2024)	1. Ikan kembung	7	$2,8 \times 10^4$	9,2	Negatif	Negatif
		2. Ikan tongkol	7	$8,0 \times 10^3$	< 3	Negatif	Negatif
		3. Ikan cakalang	7	$1,4 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif
		4. Ikan layang	7	$1,7 \times 10^4$	< 3	Positif	Negatif
		5. Ikan baby tuna	7	$< 2,5 \times 10^4$	< 3	Negatif	Negatif

Keterangan:

Hasil pengujian melebihi ambang batas persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013)

Pengujian organoleptik/sensori adalah cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu sensori (SNI 2346:2015). Nilai organoleptik/sensori yang diperoleh selama melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik adalah 7. Berdasarkan SNI 2729:2013 untuk ikan segar, nilai organoleptik/sensori yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pangan adalah minimal 7 (kisaran 1-9). Hal tersebut menunjukkan bahwa ikan hasil pengambilan contoh memenuhi syarat mutu dan keamanan ikan segar.

Metode penentuan angka lempeng total (ALT) digunakan untuk menentukan jumlah total mikroorganisme pada produk perikanan. Prinsip metode ini adalah mikroorganisme ditumbuhkan dengan metode agar tuang, diinkubasi dalam kondisi aerob atau anaerob pada suhu dan waktu yang sesuai hingga tumbuh dan berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat dihitung (SNI 2332.3:2015). Ikan yang memiliki jumlah bakteri yang semakin banyak menunjukkan ikan tersebut semakin rendah kesegarannya. Nilai ALT hasil pengujian pengambilan contoh di 6 (enam) lokasi pengawasan menunjukkan bahwa terdapat ikan dengan nilai ALT yang tidak sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan ikan segar. Persyaratan mutu dan keamanan ikan segar menurut SNI 2729:2013, yaitu nilai maksimum ALT  $5 \times 10^5$  koloni / gram. Nilai ALT secara umum tidak terkait dengan bahaya keamanan pangan namun kadang bermanfaat untuk menunjukkan kualitas, masa simpan/waktu paruh, kontaminasi dan status higienis pada saat proses produksi.



Penentuan bakteri *E.coli* dilakukan untuk menentukan bakteri indikator sanitasi pada produk perikanan. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat beberapa ikan yang memiliki jumlah bakteri *E.coli* yang lebih dari syarat keamanan pangan. Adanya jumlah bakteri *E. coli* yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan mungkin saja disebabkan karena bakteri tersebut mencemari air dan alat-alat yang digunakan selama proses penanganan ikan. Kontaminasi bakteri ini pada ikan merupakan suatu indikasi bahwa praktek sanitasi dalam suatu rantai penanganan ikan kurang baik. Adapun batas maksimum *Escherichia coli* untuk ikan segar (SNI 2729:2013) dan ikan beku (SNI 4110:2014) adalah  $< 3$  APM / gram.

Hasil pengujian pengambilan contoh untuk parameter uji *Salmonella* sp. menunjukkan bahwa ikan yang menjadi target pengambilan contoh, ditemukan adanya dua jenis ikan yaitu ikan cakalang dan ikan layang pada kegiatan INPRES 01 semester II, positif mengandung *Salmonella* sp. Ikan yang terkontaminasi bakteri *Salmonella* sp. mungkin saja disebabkan karena kontaminasi silang dari bahan pangan yang telah terkontaminasi, ikan terkontaminasi oleh peralatan yang sangat tidak memperhatikan higienitas, air dan es yang digunakan tidak bersih, dan kurangnya memperhatikan sanitasi. Menurut Aziz (2009), faktor yang mempengaruhi ikan terkontaminasi bakteri *Salmonella* sp. adalah kurangnya suplai air bersih, ketidacukupan proses sanitasi, buruknya higienitas dan masalah keamanan pangan. Persyaratan mutu dan keamanan ikan segar (SNI 2729:2013) dan ikan beku (SNI 4110:2014), yaitu *Salmonella* negatif.

Hasil pengujian pengambilan contoh untuk parameter uji formalin menunjukkan tidak ditemukan adanya kandungan formalin. Hal ini berarti ikan-ikan yang ada pada lokasi pengambilan contoh tersebut masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa ikan mengandung formalin maka ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena formalin ini merupakan bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Menurut BPOM (2003) dalam Sanger dan Montolalu (2008), formalin dengan konsentrasi 1 – 2% kontak langsung dengan kulit dapat menyebabkan iritasi dan konsentrasi 25% bersifat korosif. Formalin ini sangat mudah diserap melalui saluran pernapasan. Bila formalin digunakan dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan efek pada organ tubuh yaitu luka pada ginjal, paru-paru, kanker pada hidung dan dapat menyebabkan kematian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033



Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan, formalin merupakan salah satu bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan.

#### 2.4 Capaian

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik sesuai target Indikator Kinerja Utama Stasiun KIPM Baubau tahun 2024 ditargetkan 2 lokasi wilayah, yaitu Kota Baubau dan Kab. Buton. Kota Baubau dengan 4 lokasi usaha (lokus), yaitu PPI Wameo, Pasar Wameo, Pasar Karya Nugraha dan Pasar Lowu-lowu. Kab. Buton dengan 2 lokus, yaitu Pasar Sabho dan Pasar Takimpo. Kegiatan dilakukan persemester atau 2 (dua) kali dalam setahun dan terealisasi sesuai target.

#### 2.5 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana jadwal yang telah disusun pada awal tahun sehingga dilakukan beberapa kali perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi aktual;
2. Beberapa ikan hasil tangkapan bersifat musiman sehingga sampel yang diambil tidak sama pada setiap semester;
3. Kurangnya kesadaran para penjual ikan tentang pentingnya memperhatikan sanitasi dan higiene dalam melakukan penanganan ikan yang dijual.

#### 2.6 Rencana Tindak Lanjut

Hasil Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik yang telah dilaksanakan oleh SKIPM Baubau pada tahun 2024 akan dilaporkan dan dipaparkan kembali kepada instansi pemerintah daerah terkait. Data hasil pengujian yang melebihi ambang batas dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan terhadap pedagang dan *supplier* pemasok bahan baku. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah



## BAB III PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik tahun 2024 dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kota Baubau dan Kab. Buton sesuai dengan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Baubau. Lokasi usaha yang menjadi obyek pengawasan untuk Kota Baubau, yaitu PPI Wameo, Pasar Wameo, Pasar Karya Nugraha dan Pasar Lowu-lowu. Lokasi usaha untuk Kabupaten Buton, yaitu Pasar Sabho dan Pasar Takimpo. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu pada Bulan Maret dan Bulan September.

Untuk semester I Hasil pengamatan lokasi pengawasan terhadap penilaian sarana prasarana dan sanitasi higiene menunjukkan bahwa kategori **kurang** terdapat 1 pasar, kategori **cukup** 3 pasar dan kategori **baik** 2 pasar. Sedangkan untuk semester II, menunjukkan bahwa kategori **cukup** 4 pasar dan kategori **baik** 2 pasar. Hasil pengujian ALT menunjukkan ada beberapa sampel yang melebihi ambang batas  $5 \times 10^4$  koloni/gram. Hasil pengujian *E.coli* juga menunjukkan ada beberapa sampel yang melebihi ambang batas  $< 3$  APM/gram dengan kisaran 3,0 – 15 APM/gram. Hasil pengujian sampel untuk *Salmonella* menunjukkan hasil negatif untuk semua sampel pengujian semester I dan terdapat dua sampel positif mengandung *Salmonella* pada pengujian semester II. Hasil pengujian sampel untuk bahan pengawet tambahan berupa formalin menunjukkan hasil negatif untuk semua sampel.

### 3.2 Saran/Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan dari hasil kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik harus dilakukan secara konsisten untuk memonitoring mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat domestik;
2. Perlu disosialisasikan kepada para nelayan atau penjual ikan terkait cara



penanganan ikan yang baik sehingga dapat dilakukan perbaikan selama tahap penanganan ikan hasil tangkapan untuk meminimalisir kontaminasi bakteri;

3. Perlu disosialisasikan kepada para nelayan dan masyarakat luas terkait bahaya penggunaan formalin sebagai pengawet yang biasa digunakan untuk mengawetkan ikan segar;
4. Perlu juga dilakukan perbaikan terhadap sarana prasarana dan sanitasi hygiene agar sesuai dengan SSOP dan GMP sehingga dapat meminimalisir resiko kontaminan terhadap produk yang dijual. Hal ini juga bertujuan agar ikan yang dijual tetap terjaga mutu dan kesegarannya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz I. 2009. Isolasi *Salmonella* spp. pada tiga jenis ikan di wilayah Bogor serta uji ketahanannya terhadap pengaruh proses pengukusan. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [BKIPM] Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 2021. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat. Jakarta: BKIPM.
- [KEMENKES] Kementerian Kesehatan. 2012. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Sanger G, Montolalu L. 2008. Metode Pengurangan Kadar Formalin pada Ikan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*L). *Warta Wiptek*. 32: 6-10. ISSN :08544667
- [SNI] Standar Nasional Indonesia. 2013. SNI 2729:2013: Ikan segar. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- [SNI] Standar Nasional Indonesia. 2015. SNI 2332.3:2015: Cara Uji Mikrobiologi - Bagian 3: Penentuan angka lempeng total (ALT) pada produk perikanan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- [SNI] Standar Nasional Indonesia. 2015. SNI 2346:2015: Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU**  
JALAN SULTAN DAWAN KHAMALUDIN KOTA BAUBAU  
TELEPON/FAX/MILU (0402)2823214  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) POS ELEKTRONIK [baubau@kkipm.kkp.go.id](mailto:baubau@kkipm.kkp.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN BAUBAU**

NOMOR. B.92/SKIPM.BUW/KP.110/1/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN PANGKAN SEHAT**

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN BAUBAU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat;
  - Maka untuk maksud seperti diuraikan diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun 2024
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEK-KP/2013 tentang Peryaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU TENTANG TIM PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN PANGKAN SEHAT STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU TAHUN 2024.**
- KESATU :
- Membentuk Tim pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Baubau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :
- Sejalan dengan penunjukan pada lajur 2 (dua) maka Tim Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat yang sudah ditunjuk selanjutnya bertanggung jawab melaksanakan tugasnya.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun/Tim Manajemen Kinerja Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau
- KEEMPAT : Harus timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun 2024 sehubungan mulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Stasiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Usutapan di Baubau  
Pada Tanggal 31 Januari 2024

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Baubau

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP

Tembusan:  
Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN  
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN BAUBAU

NOMOR : B.92/SKIPM.BUW/KP.110/1/2024  
TANGGAL : 31 Januari 2024  
TENTANG : TIM PELAKSANAAN PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN PANGKAN SEHAT  
STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BAUBAU TAHUN 2024

**TIM MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI  
PERIKANAN TAHUN 2024**

- A. Pengarah : Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP  
B. Penanggung jawab : Saptari Joan Tatra, S.Pi  
C. Pelaksana:

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI
<b>Ketua</b>		
1.	Siti Marlina Kadir, S.Pi	Stasiun KIPM Baubau
<b>Pelaksana</b>		
1.	Inspektur Mutu, Fungsional Tertentu, Staff Administrasi, PPNPN	Stasiun KIPM Baubau
2.	Tim Teknis	Dinas Perikanan Kota Baubau
3.	Tim Teknis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau
4.	Tim Teknis	Loka POM Kota Baubau
5.	Tim Teknis	Dinas Perikanan Kabupaten Buton

KEPALA STASIUN,  
  
(Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, MP)

No.	Lokasi	Hasil Pengamatan Sarana Prasarana, Sanitasi dan Hygiene Lingkungan	Organoleptik (Masuk Standar ?)					E. coli (MPN/gram) (Masuk Standar = Neg)					Salmonella (per 25 gram) (Masuk Standar = Neg)					Formalin (Masuk Standar = Neg)					ALT (Masuk Standar = $< 5,0 \times 10^6$ )				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pasar Raya Sungai, Kota Serang	1) Ikan Kuning 2) Ikan Tenggali 3) Ikan Kakalane 4) Ikan Layang 5) Ikan Kembung	7	7	7			<3	<3	<5	<3		Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	$3,6 \times 10^4$	$5,0 \times 10^4$	$7,8 \times 10^4$	$8,0 \times 10^4$	$1,6 \times 10^5$
2	Pasar Telukun, Kabupaten Serang	1) Ikan Kuning 2) Ikan Tenggali 3) Ikan Kakalane 4) Ikan Layang 5) Ikan Kembung	7	7	7			<3	<3	<3	<3		Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	$2,6 \times 10^4$	$3,6 \times 10^4$	$1,6 \times 10^4$	$1,7 \times 10^4$	$1,1 \times 10^4$

5. Hasil pengamatan

No.	Lokasi	Hasil Pengamatan Sarana Prasarana, Sanitasi dan Hygiene Lingkungan	Organoleptik (Masuk Standar ?)					E. coli (MPN/gram) (Masuk Standar = Neg)					Salmonella (per 25 gram) (Masuk Standar = Neg)					Formalin (Masuk Standar = Neg)					ALT (Masuk Standar = $< 3,0 \times 10^6$ )				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pasar Telukun, Kabupaten Serang	1) Ikan Kuning 2) Ikan Tenggali 3) Ikan Kakalane 4) Ikan Layang 5) Ikan Kembung	7	7	7			<3	<3	<3	<3		Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	$1,1 \times 10^4$	$1,4 \times 10^4$	$2,2 \times 10^4$	$1,7 \times 10^4$	$2,4 \times 10^4$
2	Pasar Telukun, Kabupaten Serang	1) Ikan Kuning 2) Ikan Tenggali 3) Ikan Kakalane 4) Ikan Layang 5) Ikan Kembung	7	7	7			<3	<3	<3	<3		Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	$8,4 \times 10^4$	$1,32 \times 10^4$	$1,0 \times 10^4$	$1,1 \times 10^4$	$9,0 \times 10^4$



2. Hasil Pengamatan

No	Lokasi	Hasil Pengamatan Sarana Fisik dan Sertifikasi dan Rincian Lingkungan	Organisik (Masuk Standar > 7)					Fisik (BPM gram) (Masuk Standar - Neg)					Sistemik (per 95 gram) (Masuk Standar - Neg)					Fungsi (Masuk Standar - Neg)					ALT (Masuk Standar = < 5.0 x 10 <sup>4</sup> )				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pasar Laku Halal	Laku Halal 1 Mayor Rencana 1 Mayor Sarana 1 Mayor Sertifikasi 1 Mayor Lingkungan 1 Mayor	7	7	7	7	7	<3	<3	<3	<3	<3	Negatif	Negatif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	3.0 x 10 <sup>4</sup>	4.0 x 10 <sup>4</sup>	7.0 x 10 <sup>4</sup>	2.1 x 10 <sup>4</sup>	1.7 x 10 <sup>4</sup>
2	Pasar Laku Halal	Laku Halal 1 Mayor Rencana 1 Mayor Sarana 1 Mayor Sertifikasi 1 Mayor Lingkungan 1 Mayor	7	7	7	7	7	<3	<3	<3	<3	<3	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	< 2.5 x 10 <sup>4</sup>	8.0 x 10 <sup>4</sup>	1.4 x 10 <sup>4</sup>	1.7 x 10 <sup>4</sup>	2.8 x 10 <sup>4</sup>



**PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%)  
JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
di WILAYAH KOTA BAUBAU  
SEMESTER I TAHUN 2024**

**A. Penilaian sarana dan prasarana**

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / \text{total kriteria ditemukan}$$

Sebelum dilakukan survey ditemukan

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	0
Cukup	50	3
Kurang	30	1
Tota		4

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{0 \times 100}{4} + \frac{0 \times 75}{4} + \frac{3 \times 50}{4} + \frac{1 \times 30}{4} = 45,00$$

**B. Penilaian pengujian produk**

Penilaian bobot pengujian produk berdasarkan nilai skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E.coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata} = \frac{1}{n} \sum_{(i=1)}^n [Y_i]$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan

$$(7 + 7) / 20 = 7 \times 10 = 70$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Formalin dan Salmonella rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / \text{total kriteria ditemukan}$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria Salmonella	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Kriteria ditemukan	Nilai skor
$>5 \times 10^5$	0	$>3$	Positif	0	0	0	10
$<5 \times 10^5$	20	$<3$	Negatif	20	20	20	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria  $>5 \times 10^5$  dan  $<5 \times 10^5$

$$\frac{0 \times 10}{20} + \frac{20 \times 100}{20} = 100$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria  $>3$  dan  $<3$

$$\frac{0 \times 10}{20} + \frac{20 \times 100}{20} = 100$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{20} + \frac{20 \times 100}{20} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{20} + \frac{20 \times 100}{20} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = \frac{1}{n} \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 70
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 100
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 100
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 100
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{70 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 94,00$$

**C. Penilaian jaminan mutu**

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 45,00
2. Nilai pengujian produk = 94,00

$$(60\% \times 45,00) + (40\% \times 94,00) = 64,60\%$$

persyaratan.

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Baubau pada semester I tahun 2024 64,60% dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 35,40% dalam kriteria yang belum memenuhi

Diperiksa oleh : Ash Shaf Ahmad F-tah, S.Pi  
Tanggal : 14 Mei 2024  
Tanda Tangan :



Disetujui oleh : Anis Gasmono, S.St.Ti  
Tanggal : 11 Juli 2024  
Tanda Tangan :



**PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%)  
JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
di WILAYAH KABUPATEN BUTON  
SEMESTER I TAHUN 2024**

**A. Penilaian sarana dan prasarana**

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	2
Cukup	50	0
Kurang	25	0
Total		2

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria kurang

$$\frac{0 \times 100}{2} + \frac{2 \times 75}{2} + \frac{0 \times 50}{2} + \frac{0 \times 25}{2} = 75$$

**B. Penilaian pengujian produk**

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n [V_i] \quad \left[ \frac{\text{Jumlah data}}{\text{Jumlah data dibagi banyak data}} \right]$$

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7) / 10 = 7 \times 10 = 70$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Formalin dan Salmonella rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria E.coli	Kriteria Salmonella	Kriteria Formalin	Nilai skor
>= x 10 <sup>2</sup>	>= 3	Fusif	Fusif	10
<= x 10 <sup>3</sup>	< 3	Negatif	Negatif	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >5 x 10<sup>2</sup> dan <5 x 10<sup>3</sup>

$$\frac{1 \times 10}{10} + \frac{9 \times 100}{10} = 91$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n V_i \quad \left[ \frac{\text{Jumlah data}}{\text{Jumlah data dibagi banyak data}} \right]$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 70
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 91
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 100
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 100
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{70 + 91 + 100 + 100 + 100}{5} = 92,20$$

**C. Penilaian jaminan mutu**

$$\text{jaminan mutu} = (50\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 75
2. Nilai pengujian produk = 92,20

$$(50\% \times 75) + (40\% \times 92,20) = 81,88 \%$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kab. Buton pada semester I tahun 2024 81,88% dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 18,12% dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Diperiksa oleh : Ash Shaf Arrad Fitrah, S.Pi  
Tanggal : 14 Mei 2024  
Tanda Tangan:



Disetujui oleh : Aris Sasong, S.St.Pi  
Tanggal : 11 Juli 2024  
Tanda Tangan:



**PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%)  
JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
di WILAYAH KOTA BAUBAU  
SEMESTER II TAHUN 2024**

**A. Penilaian sarana dan prasarana**

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat baik	100	0
Baik	75	0
Cukup	50	1
Kurang	30	0
Total		4

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk.

$$\frac{0 \times 100}{4} + \frac{0 \times 75}{4} + \frac{1 \times 50}{4} + \frac{0 \times 30}{4} = 50,00$$

**B. Penilaian pengujian produk**

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7) / 20 = 1 \times 10 = 10$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E coli, Formalin dan Salmonella rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Nilai skor
>5 x 10 <sup>5</sup>	1	>3	3	Positif	0	Positif	0	10
<5 x 10 <sup>5</sup>	19	<3	17	Negatif	20	Negatif	20	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >5 x 10<sup>5</sup> dan <5 x 10<sup>5</sup>

$$\frac{1 \times 10}{20} + \frac{19 \times 100}{20} = 95,50$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{3 \times 10}{20} + \frac{17 \times 100}{20} = 86,50$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{20} + \frac{20 \times 100}{20} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{20} + \frac{20 \times 100}{20} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

- Setelah dilakukan survey didapatkan
1. Nilai organoleptik dari produk = 70
  2. Nilai kriteria bakteri ALT = 95,50
  3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 86,50
  4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 100
  5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{70 + 95,50 + 86,50 + 100 + 100}{5} = 90,40$$

**C. Penilaian jaminan mutu**

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 50,00
2. Nilai pengujian produk = 90,40

$$(60\% \times 50,00) + (40\% \times 90,40) = 66,16\%$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Baubau pada semester II tahun 2024 66,16% dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 33,84% dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Diperiksa oleh : Aprini Awalia, S.Tr. Pl

Tanggal : 4 Desember 2024

Tanda Tangan : 

Disetujui oleh : Hendri, S.Pi, M.Si

Tanggal : 9 Desember 2024

Tanda Tangan : 



**PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%)  
JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
di WILAYAH KABUPATEN BUTON  
SEMESTER II TAHUN 2024**

**A. Penilaian sarana dan prasarana**

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	2
Cukup	50	0
Kurang	30	0
Total		2

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{0 \times 100}{2} + \frac{2 \times 75}{2} + \frac{0 \times 50}{2} + \frac{0 \times 30}{2} = 75$$

**B. Penilaian pengujian produk**

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7) / 8 = 7 \times 10 = 70$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Formalin dan Salmonella rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Nilai skor
$>5 \times 10^2$	0	$>3$	1	Positif	2	Positif	0	10
$<5 \times 10^2$	10	$<3$	8	Negatif	8	Negatif	10	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria  $>5 \times 10^2$  dan  $<5 \times 10^2$

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria  $>3$  dan  $<3$

$$\frac{1 \times 10}{10} + \frac{9 \times 100}{10} = 91$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{2 \times 10}{10} + \frac{8 \times 100}{10} = 82$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 70
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 100
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 91
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = 82
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{70 + 100 + 91 + 82 + 100}{5} = 88,60$$

**C. Penilaian jaminan mutu**

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 75
2. Nilai pengujian produk = 88,60

$$(60\% \times 75) + (40\% \times 88,60) = 80,44\%$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kab. Buton pada semester II tahun 2024 80,44% dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 19,56% dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Diperiksa oleh : Aprini Awalita, S.Tr. PI

Tanggal : 4 Desember 2024

Tanda Tangan :



Disetujui oleh : Hendri, S.Pi, M.Si

Tanggal : 9 Desember 2024

Tanda Tangan :






**Foto-foto Kegiatan Semester I**

1 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestic di PP Wameo



Lingkungan PP Wameo



Ikan Cakalang PP Wameo



Lapak Ikan Cakalang PP Wameo



Ikan Kembung PP Wameo



Lapak Ikan Kembung PP Wameo



Ikan Tongkol PP Wameo



Lapak Ikan Tongkol PP Wameo



Ikan Baby Tuna PP Wameo



Lapak Ikan Baby Tuna PP Wameo



Ikan Layang PP Wameo



Lapak Ikan Layang PP Wameo



Lingkungan Sekitar Lapak Ikan di PP Wameo



Jalur Akses Menuju Lapak Pedagang Ikan di PP Wameo



Lantai Lapak Pedagang



Saluran Pembuangan Sekitar Lapak



Toilet di PP Wameo



Stasiun Air di PP Wameo



Cuci Tangan PP Wameo



Ferlogrepan di PP Wameo

Stasiun KIPM Babat



Alat Angkut di PP Wameo



Cara Pedagang Menangani Ikan di PP Wameo



Tempat Limbah di PP Wameo



2. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan: Hasil Perikanan Domestik di Pasar Wameo



Ikan Tongkol Pasar Wameo



Lapak Ikan Tongkol Pasar Wameo



Ikan Cakalang Pasar Wameo



Lapak Ikan Cakalang Pasar Wameo



Ikan Kembung Pasar Wameo



Lapak Ikan Pasar Wameo



Ikan Bahy Tuna Pasar Wameo



Lapak Ikan Bahy Tuna Pasar Wameo



Ikan Layang Pasar Wameo



Lapak Ikan Layang Pasar Wameo



Lingkungan Lapak di Pasar Wameo



Jalur Menuju Lapak Ikan di Pasar Wameo



Lantai Pasar Wameo



Limbah Pasar Wameo



Bangunan Tampak Luar Pasar Wameo



Toilet Pasar Wameo

Stasiun KIPM Bانبau



Peralatan di Pasar Wameo



Alat Angkut Ikan di Pasar Wameo



Penlaku Pedagang di Pasar Wameo



Sumber Air di Pasar Wameo



Tempat Pembuangan Sampah di Pasar Wameo



3. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Karya Nugraha



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan cabalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan cabalang



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan Stasiun KIPM Baubau



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Lapak Pedagang



Lantai lapak pedagang



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Saluran pembuangan di sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Toilet Pasar Karya Nugraha



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



#### 4. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Lowu-low



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan Tongkol



Close up sampel ikan Cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel Ikan Cakalang



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak pedagang



Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



Saluran pembuangan sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Toilet dan fasilitas pencuci tangan pasar lowu-lowu



Sumber air dilapak pedagang



Peralatan dilapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



5. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Sabhu



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan cakalang



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



Sahuran pembuangan di sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Toilet Pasar Sabho



Fasilitas pencuci tangan



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang

6. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Takimpo



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan cakalang



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Lapak pedagang dan tingkah laku pedagang



Lantai lapak pedagang



II. Foto-foto Kegiatan Semester II

1. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Lowu-lowu



Sauran pembuangan di sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Toilet Pasar tkimpo



Fasilitas Pencuci tangan



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang dan cara pedaga menangani ikan



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Limbah hasil jualan pedagang



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan cakalang

Gedung KIPM Seub...



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Sauran pembuangan di sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



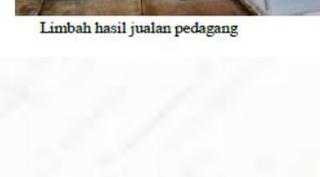
Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



Toilet Pasar Lowu-lowu



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



2. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Sabho



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai Sampel layang



Close up sampel ikan Tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan Cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Lingkungan sekitar lapak Pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak Penjual ikan



Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



Saluran pembuangan di



Sumber penerangan di lapak



3. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Takimpo



Toilet Pasar Sabho



Fasilitas pencuci tangan



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Alat angkut di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna





Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan cakalang



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



Saluran pembuangan di sekitar



Sumber penerangan di lapak



Toilet Pasar Takimpo



Fasilitas pencuci tangan



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



#### 4. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pelabuhan Penikanan (PP) Wameo



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Close up sampel ikan cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan Cakalang



Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



5. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Wameo



Saharan pembuangan di sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Toilet PPI Wameo



Fasilitas pencuci tangan



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan kembung



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembung



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Toilet Pasar Sabho



Fasilitas pencuci tangan



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Lapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Lantai lapak pedagang



Saharan pembuangan di sekitar lapak



Sumber penerangan di lapak pedagang



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



6. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Pasar Karya Nugraha



Bangunan tampak luar secara keseluruhan



Lingkungan bangunan secara keseluruhan



Close up sampel ikan cakalang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan cakalang



Close up sampel ikan baby tuna



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan baby tuna



Close up sampel ikan kembang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan kembang



Close up sampel ikan tongkol



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan tongkol



Close up sampel ikan layang



Lapak pedagang yang diambil sebagai sampel ikan layang



Lingkungan sekitar lapak pedagang ikan



Jalur akses menuju lapak penjual ikan



Toilet Pasar Karya Nugraha



Lapak pedagang



Lantai lapak pedagang



Sumber air di lapak pedagang



Peralatan di lapak pedagang



Alat angkut ikan di lokus yang diamati



Cara pedagang menangani ikan



Saluran pembuangan di sekitar lapak pedagang



Sumber penerangan di lapak pedagang



Limbah hasil jualan pedagang



Tingkah laku pedagang



**STASIUN KIPM  
BAUBAU**

**T.A. 2024**

JL. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 20 Kota Baubau  
[www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)  
Pos Elektronik: [baubau@kipm.kkp.go.id](mailto:baubau@kipm.kkp.go.id)

Lampiran 5. Bukti Dukung Pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Baubau



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Nomor : B.32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025 10 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Capaian IKU Sistem  
Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan  
Lembaga Inspeksi lingkup UPT BPPMHKP

Yth. Seluruh Kepala UPT BPPMHKP

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,35 didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 84,85 didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar 83,10.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

1. Kepala Badan Penegndalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Badan Penegndalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**NOTA DINAS**

NOMOR : 132/BPPMHKP.1/KI.120/V/2025

Yth. : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP  
Dari : Sekretaris Badan PPMHKP  
Sifat : Biasa  
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 13 Januari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan terdapat satu UPT yaitu BPPMHKP Gorontalo yang melakukan SKM secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM. Sehingga terdapat perbedaan nilai SKM antara aplikasi susan <https://ptsp.kkp.go.id/> dan hasil perhitungan yang melibatkan seluruh UPT BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai SKM	Keterangan
1	94,87	Perhitungan 46 UPT melalui aplikasi Susan dan 1 UPT (BKIPM Gorontalo) menggunakan metode luring secara
2	94,89	Nilai BPPMHKP pada <a href="https://ptsp.kkp.go.id/">https://ptsp.kkp.go.id/</a>

Sehingga untuk nilai SKM yang menjadi capaian BPPMHKP pada TW IV tahun 2024 adalah 94,87 dengan rata-rata per unsur 3.79 (Rekapitulasi terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Hari Maryadi**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

**MEMORANDUM**

NOMOR : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan  
Dari : Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan  
Sifat : Biasa  
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 9 Januari 2024

---

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Tim Kerja Pelayanan Publik, Sekretariat BPPMHKP sebagai penanggung jawab pelayanan publik lingkup BPPMHKP, telah melaksanakan SKM lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP). Berkenaan dengan pelaksanaan survei tersebut, bersama ini kami laporkan hal hal sebagai berikut :

1. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Oktober s.d Desember 2024 dengan ketentuan:
  - a. SKM dilakukan secara online melalui alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login> yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa layanan;
  - b. SKM dilakukan terhadap setiap layanan yang diberikan oleh UPT BPPMHKP selaku unit penyelenggara pelayanan (UPP) secara *real time*;
  - c. Unsur yang dilakukan survei antara lain:
    - 1). Persyaratan,

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN

- 2). Sistem, mekanisme, prosedur,
  - 3). Waktu penyelesaian,
  - 4). Biaya/tarif,
  - 5). Produk layanan,
  - 6). Perilaku pelaksana,
  - 7). Kompetensi pelaksana,
  - 8). Penanganan pengaduan, dan
  - 9). Sarana prasarana;
- d. Hasil pelaksanaan SKM dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dimiliki, seperti: sosial media, (Instagram, Facebook dan Twitter), website, leaflet, brosur, banner, dll.
2. Hasil pelaksanaan SKM periode Triwulan IV tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Jumlah UPT BPPMHKP yang melaksanakan SKM periode Triwulan IV sebanyak **47 UPT (seluruh UPT)**;
  - b. Nilai rata-rata SKM dari seluruh UPT BPPMHKP periode Triwulan IV tahun 2024 adalah **94,87** dengan mutu pelayanan kategori mutu "**Sangat Baik**". Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SKM Triwulan IV Tahun 2024 sudah di atas target IKU yaitu nilai rata-rata SKM di 47 Satker/UPT BPPMHKP adalah  $\geq 88,30$ ;
  - c. Jumlah UPT BPPMHKP yang mendapat nilai SKM dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kerja atau seluruh UPT BPPMHKP. Matriks hasil survei selengkapnya sebagaimana terlampir;
  - d. Nilai SKM 3 (tiga) UPT tertinggi:
    - i. Balai KIPM Balikpapan: 100,00
    - ii. Balai KIPM Ambon : 100,00
    - iii. Stasiun KIPM Padang : 100,00
  - e. Nilai SKM 3 (tiga) UPT terendah:
    - i. Balai Uji Standar KIPM : 88,82
    - ii. Stasiun KIPM Sorong : 89,07
    - iii. Stasiun KIPM Palu : 89,35

- f. Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan untuk seluruh UPT BPPMHKP antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,83
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3,81
3	Waktu penyelesaian	3,76
4	Biaya/Tarif	3,80
5	Produk Spesifikasi jenis layanan	3,81
6	Kompetensi pelaksana	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,78
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,81
9	Sarana dan Prasarana	3,79
<b>Rata-Rata</b>		<b>3,79</b>

3. Analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut :
- a. Pada survei kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP Triwulan IV tahun 2024 terdapat 2.457 responden jumlahnya menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 2.980. Nilai SKM pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34 dibandingkan nilai SKM pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 93,53 naik menjadi 94,87;
  - b. Selama Triwulan IV terdapat 2 (dua) UPT yang memiliki jumlah responden paling sedikit sebanyak 4 (empat) responden yaitu Balai KIPM Jayapura dan Stasiun KIPM Tahuna;
  - c. Nilai unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana dengan nilai 3,76. Meskipun kompetensi petugas masih dalam kategori sangat baik namun pengguna jasa berharap petugas pelayanan selalu sigap dan responsif dalam melakukan pelayanan, serta mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu;
  - d. Terdapat satu UPP yaitu SKIPM Gorontalo yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada

- pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM;
- e. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai SKM antara lain:
- i. Melakukan pembinaan kepada UPT BPPMHKP yang:
    - a) Nilai SKM dibawah target > 88,30; dan
    - b) Jumlah respondennya belum memadai.
  - ii. Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unsur terendah yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana;
  - iii. Memastikan secara berkala bahwa setiap UPP melakukan SKM dan melaporkan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
  - iv. Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan BPPMHKP;
  - v. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait penggunaan tools SUSAN KKP dalam melakukan survei kepuasan masyarakat;
  - vi. Melakukan penyegaran atau bimtek tentang peraturan perundang undangan yang terkait pelayanan pelayanan publik serta prinsip prinsip pelayanan prima.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Hari Maryadi**

Lampiran  
 Nomor : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

Tabel Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
 Unit Pelayanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4.00	100	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Ambon	8	4.00	100	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4.00	100	A	Sangat Baik
4	Balai KIPM Jayapura	4	4.00	100	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Tahuna	4	4.00	100	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	86	3.99	99.74	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3.93	98.34	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Mamuju	7	3.92	98.02	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	32	3.92	98	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3.92	97.99	A	Sangat Baik
11	Balai KIPM Mataram	23	3.91	97.71	A	Sangat Baik
12	Stasiun KIPM Pontianak	60	3.91	97.69	A	Sangat Baik
13	Stasiun KIPM Yogyakarta	13	3.90	97.44	A	Sangat Baik
14	Stasiun KIPM Batam	19	3.89	97.37	A	Sangat Baik
15	Balai KIPM Tanjung Pinang	123	3.85	96.14	A	Sangat Baik
16	Stasiun KIPM Merauke	17	3.84	96.08	A	Sangat Baik
17	Balai KIPM Semarang	73	3.83	95.74	A	Sangat Baik
18	Balai KIPM Surabaya II	102	3.82	95.59	A	Sangat Baik
19	Stasiun KIPM Jambi	22	3.82	95.58	A	Sangat Baik
20	Stasiun KIPM Bandung	25	3.82	95.44	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
21	Stasiun KIPM Cirebon	54	3.81	95.32	A	Sangat Baik
22	Stasiun KIPM Kendari	35	3.81	95.24	A	Sangat Baik
23	Stasiun KIPM Bengkulu	15	3.80	95	A	Sangat Baik
24	Stasiun KIPM Bima	32	3.80	94.97	A	Sangat Baik
25	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	64	3.78	94.62	A	Sangat Baik
26	Balai Besar KIPM Makassar	404	3.77	94.2	A	Sangat Baik
27	Balai KIPM Entikong	32	3.76	94.1	A	Sangat Baik
28	Balai KIPM Tarakan	6	3.76	93.98	A	Sangat Baik
29	Stasiun KIPM Palangkaraya	35	3.76	93.97	A	Sangat Baik
30	Balai KIPM Manado	45	3.74	93.46	A	Sangat Baik
31	Stasiun KIPM Palembang	67	3.73	93.33	A	Sangat Baik
32	Stasiun KIPM Bau-Bau	22	3.73	93.18	A	Sangat Baik
33	Balai KIPM Jakarta II	50	3.71	92.72	A	Sangat Baik
34	Balai KIPM Denpasar	264	3.70	92.5	A	Sangat Baik
35	Balai KIPM Surabaya I	90	3.69	92.16	A	Sangat Baik
36	Stasiun KIPM Aceh	12	3.66	91.44	A	Sangat Baik
37	Balai KIPM Lampung	29	3.65	91.28	A	Sangat Baik
38	Stasiun KIPM Medan II	100	3.63	90.83	A	Sangat Baik
39	Balai Besar KIPM Jakarta I	74	3.63	90.65	A	Sangat Baik
40	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	10	3.61	90.28	A	Sangat Baik
41	Balai KIPM Medan I	36	3.60	90.05	A	Sangat Baik
42	Stasiun KIPM Gorontalo	15	3.59	89.83	A	Sangat Baik
43	Stasiun KIPM Kupang	63	3.59	89.68	A	Sangat Baik
44	Stasiun KIPM Merak	11	3.58	89.39	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
45	Stasiun KIPM Palu	6	3.57	89.35	A	Sangat Baik
46	Stasiun KIPM Sorong	76	3.56	89.07	A	Sangat Baik
47	Balai Uji Standar KIPM	43	3.55	88.82	A	Sangat Baik

## Lampiran 7. Bukti Dukung Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAO IP ASN 2023

Silakan ketik Nama Unit Kerja.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	6	20.83	83.32 %	32.5	83.75 %	25	83.33 %	4.5	90 %	87.53	TINGGI
47	STASIUN KIPM TAHUNA	10	21.1	84.4 %	38.92	97.3 %	25	83.33 %	5	100 %	89.02	TINGGI
48	STASIUN KIPM BAU-BAU	10	20.8	83.2 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	80.8	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	10	20.4	81.6 %	38.3	83.25 %	25	83.33 %	5	100 %	83.7	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMUJU	11	21.27	85.08 %	36.55	91.38 %	25	83.33 %	5	100 %	87.82	TINGGI
51	BALAI UJI STANDAR KIPM	22	20.59	82.36 %	38.52	96.3 %	25	83.33 %	5	100 %	85.11	TINGGI

< 1 2 3 >

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAO IP ASN 2023

Silakan ketik NIP atau Nama P.

#	Nama	Kualifikasi				Kompetensi				Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan			
		Tingkat Pendidikan	IP	Presentase	Diklat/pim	Diklat Fungsional	Diklat. 20 JP	Seminar	IP	Presentase	Predikat Kinerja	IP	Presentase			Hukuman Disiplin	IP	Presentase
1	YUNI IRAWATI WILAJA	S-2	23	82 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	SANGAT TINGGI
2	ABDUL SYUKUR YASIN	S-2	23	82 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	SANGAT TINGGI
3	SAPTARI JOAN TAIRA	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
4	SITI MARILINA KADIR	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	ALEXANDER WICAKSONO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
6	BAMBANG S	D-III	21	84 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	NI KADEK WIRATI	D-III/D-IV/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
8	RIKI PURNOMO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
9	I PUTU SUGIASA	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
10	SUPRIADI	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI

< >

Lampiran 8. Bukti Dukung Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [set.bppmhkp@kkp.go.id](mailto:set.bppmhkp@kkp.go.id)

2 Januari 2025

Nomor : B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di

tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.3977/BPPMHKP.1/RC.610/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PedomanEvaluasiAKIP2024>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar Nilai 82, Sebanyak 40 UPT (80,40%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 10 UPT (19,60%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPMHKP	24.00	24.00	13.80	22.50	84.30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24.90	24.90	13.50	20.00	83.30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
5	BBKIPM Jakarta I	22.80	24.00	13.50	22.50	82.80	A
6	BBKIPM Makassar	25.50	25.50	12.30	20.50	83.80	A
7	BKIPM Denpasar	24.00	23.10	13.50	22.50	83.10	A
8	BKIPM Surabaya I	24.00	22.20	13.50	22.50	82.20	A
9	BKIPM Medan I	22.20	24.00	13.50	22.50	82.20	A
10	BKIPM Balikpapan	24.00	24.00	12.75	21.25	82.00	A
11	BKIPM Jayapura	22.50	23.70	12.00	16.00	74.20	BB
12	BKIPM Jakarta II	23.70	23.70	13.50	21.25	82.15	A
13	BKIPM Surabaya II	24.00	25.50	11.10	22.50	83.10	A
14	BKIPM Mataram	24.00	27.00	12.60	20.00	83.60	A
15	BKIPM Manado	24.90	24.00	12.00	22.50	83.40	A
16	BKIPM Semarang	27.00	24.00	12.00	21.25	84.25	A
17	BKIPM Banjarmasin	23.10	24.30	13.50	22.50	83.40	A
18	BKIPM Lampung	22.20	27.00	13.50	20.00	82.70	A
19	BKIPM Ambon	27.00	24.00	12.75	20.00	83.75	A
20	BKIPM Entikong	22.20	24.60	13.50	22.50	82.80	A
21	BKIPM Tanjung Pinang	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB
22	BKIPM Tarakan	24.00	24.00	12.00	22.50	82.50	A
23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A
31	SKIPM Jambi	24.00	25.50	12.60	21.25	83.35	A
32	SKIPM Palu	24.00	24.00	12.60	22.50	83.10	A
33	SKIPM Palangkaraya	24.00	24.00	12.30	22.50	82.80	A
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
42	SKIPM Sorong	24.00	24.00	12.90	22.50	83.40	A
43	SKIPM Bengkulu	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
44	SKIPM Cirebon	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
45	SKIPM Luwuk Banggai	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
46	SKIPM Tanjung Balai Asahan	20.70	19.80	9.75	12.50	62.75	B
47	SKIPM Bima	22.20	24.00	12.60	22.50	81.30	A
48	SKIPM Tahuna	16.50	22.20	12.00	18.75	69.45	B
49	SKIPM Bau-Bau	24.00	24.30	12.15	21.00	81.45	A
50	SKIPM Merak	24.00	24.00	11.10	22.50	81.60	A
51	SKIPM Mamuju	27.00	24.00	11.10	18.50	80.60	A

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥82 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 10 Satker dengan dibawah target (**≤82 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2025;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHKP Tahun 2024 dapat dilihat pada aplikasi Kinerja masing-masing satker.

Demikian disampaikan. atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Hari Maryadi**

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

---

NOTA DINAS  
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
3. Para Sekretaris Badan  
4. Kepala Biro Perencanaan  
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi  
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan  
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

---

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XIV/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Setyawati**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Lampiran 10. Bukti Dukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Baubau

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

---

NOTA DINAS  
NOMOR 196/SJ.2/RC.610/V/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal  
3. Para Sekretaris Badan  
4. Kepala Biro Perencanaan  
5. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa  
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

---

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 40/SJ.1/RC.610/V/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.20 (sesuai Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2024 sebesar 93,84 dari target nilai 93,76.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2024 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal
4. Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.60	82.45	91.68	96.67	99.18	96.79	97.66	94.34	100%	0.50	93.84
			Bobot	10	15	20	10	10	25					
			Nilai Akhir	9.96	12.37	18.34	9.67	9.92	9.68	24.41				
			Nilai Aspek	91.03		96.08				97.66				

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 15-01-25 13:19:19 oleh : KL032

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN



113	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	86.86	96.20	100.00	100.00	82.96	96.81	94.77	100%	0.00	94.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.24	10.00	10.00	8.30	24.20				
					Nilai Aspek	93.43		94.79				96.81				
114	103	032	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALUBAU	Nilai	100.00	78.65	94.21	100.00	100.00	90.84	100.00	94.72	100%	0.00	94.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	18.84	10.00	10.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	89.33		96.26				100.00				
115	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	73.16	98.83	92.00	100.00	97.58	100.00	94.70	100%	0.00	94.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.97	19.77	9.20	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	86.58		97.10				100.00				
116	127	032	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Nilai	100.00	81.84	97.78	92.00	100.00	84.07	100.00	94.44	100%	0.00	94.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	19.56	9.20	10.00	8.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		93.46				100.00				
117	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	78.88	93.46	0.00	0.00	100.00	100.00	75.52	80%	0.00	94.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.83	18.89	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.44		96.73				100.00				
118	103	032	352596	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOB I (AK KP WAKATOB I)	Nilai	100.00	87.57	90.57	100.00	100.00	99.98	92.41	94.35	100%	0.00	94.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.14	18.11	10.00	10.00	10.00	23.10				
					Nilai Aspek	93.79		97.64				92.41				

hal : 20 dari 64 halaman

tanggal cetak : 15-01-25 13:20:47 oleh : KL032

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN

Lampiran 11. Bukti Dukung Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**MEMORANDUM  
NOMOR 1/ITJ.0/TU.140/V/2025**

Yth. : 1. Inspektur I  
2. Inspektur II  
3. Inspektur III  
4. Inspektur IV  
5. Inspektur V

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Laporan Hasil Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI Lingkup KKP pada Triwulan IV Tahun 2024

Lampiran : -

Tanggal : 2 Januari 2025

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI Lingkup KKP pada Triwulan IV Tahun 2024 antara Inspektorat Jenderal dengan unit Eselon I dan Tim BPK RI di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 – 20 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Terdapat 435 rekomendasi dari semua unit Eselon I per Triwulan IV Tahun 2024 yang masih dipantau tindak lanjutnya, dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 168 rekomendasi, sehingga terdapat sisa (belum sesuai rekomendasi) sebanyak 267 rekomendasi dengan sisa nilai keuangan sebesar Rp112.536.051.462,44 Dengan rincian sebagai berikut :

Eselon I	Jumlah Rekomendasi Awal	Nilai Keuangan (Rp)			Progres TL	
		Data Sem II 2023	Tindak Lanjut	Sisa	Sesuai	Belum
Setjen	36	421.144.736,00	421.144.736,00	-	15	21
Itjen	6	23.878.250,00	23.878.250,00	-	4	2
Ditjen PKRL	44	277.148.762,52	52.494.698,00	224.654.064,52	10	34
Ditjen PT	153	119.379.197.182,16	22.675.278.632,17	96.703.918.549,99	51	102
Ditjen PB	91	11.977.003.417,76	2.489.046.453,70	9.487.956.964,06	44	47
Ditjen PSDPKP	23	3.646.371.155,02	1.651.723.641,00	1.994.647.514,02	10	13
Ditjen PSDKP	28	1.118.316.959,00	1.118.316.959,00	-	13	15
BPPSDMKP	46	5.311.470.396,85	1.186.596.027,00	4.124.874.369,85	18	28
BPPMHKP	8	11.350.000,00	11.350.000,00	-	3	5
<b>Jumlah</b>	<b>435</b>	<b>142.165.880.859,31</b>	<b>29.629.829.396,87</b>	<b>112.536.051.462,44</b>	<b>168</b>	<b>267</b>

2. Berdasarkan hasil telaahan Tim BPK RI pada Semester I 2024 masih terdapat beberapa rekomendasi pada masing-masing Eselon I antara lain :
  - a. Itjen : Terdapat 2 (dua) rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian yaitu

- LK 2020 temuan Pengamanan, Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Inspektur Jenderal melakukan reviu atas semua perjanjian Kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan KKP dengan pihak ketiga sesuai hasil koordinasi dengan DJKN. **Telaahan BPK Tindak Lanjut Belum Sesuai. Belum ada rekapitulasi atas semua perjanjian Kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan KKP dan checklist PKS yang sudah direview Itjen sesuai hasil Koordinasi dengan DJKN.** Hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk format matriks PKS perlu ditambahkan satu kolom link dokumen LHR dan dokumen tersebut diunggah juga di SIPTL. Adapun untuk satker yang belum direviu untuk didorong segera dilakukan reviu oleh Itjen.
  - LK 2023 temuan Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Terhadap Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut oleh Direktorat Jenderal PSDKP Belum Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Irjen KKP supaya mereviu hasil penghitungan ulang nilai investasi PT BTIIG dan PT ANT Tbk sebagai dasar pengenaan sanksi denda administratif, serta menyampaikan hasilnya kepada BPK. **Hasil telaah Tim BPK, Belum sesuai karena masih terdapat rencana aksi yang belum dilakukan oleh KKP, diantaranya: 1) Belum terdapat Hasil Reviu Itjen KKP atas hasil perhitungan ulang nilai investasi PT BIIG dan PT ANT 2) Belum terdapat Tindak lanjut hasil reviu Itjen KKP atas hasil perhitungan ulang nilai investasi PT BIIG dan PT ANT.**
- b. Setjen : LK 2015 temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tidak Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk menegur secara tertulis kepada para kepala satker terkait yang tidak optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan segera menyelesaikan permasalahan terkait aset tetap serta melakukan inventarisasi dan penilaian atas akun aset di KKP. Telaahan Tim BPK, Belum dilengkapi kertas kerja rekapitulasi hasil inventarisasi dan penilaian aset-aset di KKP sesuai kondisi temuan pada LHP BPK RI. Terkait temuan dari Tim Setjen menginformasikan bahwa proses

akuisisi tanah serta pelepasan tanah berlarut-larut, terdapat lahan petani plasma seluas 151 Ha berupa kolam tambak serta rumah tipe 36 yang telah diusulkan untuk diserahkan kepada petani. Usulan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-4934/A/2000 dengan nilai penggantian yang akan dihitung kemudian untuk dibayarkan oleh petani. Namun demikian para petani tersebut keberatan untuk membayar dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang tidak mampu untuk membayar penggantian sehingga meminta agar pemerintah menghibahkan aset tersebut kepada petani. Bupati Karawang memfasilitasi keberatan tersebut dengan mengirimkan surat Nomor 523/4528-EK tanggal 15 Agustus 2006 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir proses pelepasan aset belum selesai.

- c. Ditjen PKRL : PDDT PNBPN 2021 temuan KKP Belum Menetapkan Ketentuan Lebih Lanjut tentang Pengenaan PNBPN PKKPRN atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara Menetap di Kawasan Perairan yang Menjadi Kewenangannya dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar membuat kesepakatan dengan Menteri LHK tentang mekanisme pengelolaan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang laut di tujuh TN yang dikelola oleh KLHK. Telaahan Tim BPK, Belum ada kesepakatan dengan Menteri LHK tentang mekanisme pengelolaan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang laut di tujuh TN yang dikelola oleh KLHK. Sebagai tindak lanjut dalam pembahasan prioritas dengan Tim BPK, untuk diunggah Surat Setkab Nomor B.0154/Ekon/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, dan surat penjelasan dari Sekretaris/ Direktur PKRL bahwa kesepakatan dengan Menteri LHK tersebut sudah ada dalam Surat Setkab di atas, serta prakteknya sudah banyak izin KPRN yang terbit sesuai kesepakatan tersebut.
- d. Ditjen PSDKP : LHP Kinerja Semester I TA 2010 atas Pengadaan Kapal Pengawas, temuan Pelaksanaan Pengadaan Kapal Pengawas SDK Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp113.488.980,00, dengan rekomendasi Meminta pertanggungjawaban PT CBI untuk memenuhi item barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Telaahan Tim BPK, Berdasarkan kontrak, penambahan/pengurangan harus didukung persetujuan tertulis. Pihak KKP perlu melakukan penelusuran kembali terkait persetujuan tertulis atas penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak

lanjut untuk diajukan kembali Surat MKP kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV Nomor B.1952/MEN-KP/XI/2023, 29 November 2023 Hal Usulan Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan alasan yang sah atas pengadaan Kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2009 dengan menambah penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti temuan berupa surat dari Dirjen PSDKP kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV.

- e. Ditjen Perikanan Tangkap : LHP PNBP TA 2011-2013, temuan Terdapat tunggakan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada Ditjen Perikanan Tangkap per 30 Juni 2013 sebesar Rp28.876.531.364,03 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp34.560.777.416,13 dengan rekomendasi BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap meningkatkan upaya penagihan atas tunggakan PNBP berikut dendanya. Hasil telaahan Tim BPK, dari sisa Rp33.373.034.871,13 telah ditindaklanjuti s.d. Semester I/2024 senilai Rp1.177.569.389,18, sehingga masih terdapat sisa tagihan tunggakan PNBP berikut denda senilai Rp32.195.465.481,95 yang belum disetor ke Kas Negara. Belum sesuai rekomendasi, belum seluruhnya disetor ke kas negara. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk diusahakan penagihan maksimal kepada 25 kapal SIUP Aktif senilai Rp328.297.942, jika tidak ada respon penagihan yang baik maka diusulkan TPTD.
- f. BPPSDMKP : LK TA 2017, temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Lainnya Belum Memadai dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Menginstruksikan Eselon I terkait memerintahkan Kepala Satker: 1) Segera menyelesaikan upaya penelusuran, inventarisasi fisik, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung Aset Tetap yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya. 2) Mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme. 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator SIMAK BMN yang kurang cermat kurang cermat dalam mencatat dan melaporkan nilai Aset Tetap Lainnya. Telaahan Tim BPK, Tindak Lanjut belum mencakup seluruh rekomendasi, tindak lanjut. Segera update kertas kerja monitoring dokumen TL. Kertas kerja monitoring tidak hanya merinci TL tahun berjalan, namun juga TL dari tahun sebelumnya. Adapun hasil pembahasan

prioritas dengan Tim BPK diperoleh TL masih menunggu jawaban dari Bupati Kepulauan Tanimbar atas Surat Kepala BPPSDMKP No. B.608/BRSDM/PL.750/IV/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Usulan Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Renovasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana tindak lanjut memonitoring jawaban dari surat bupati, jika menerima akan dihibahkan dan jika menolak akan dihapuskan atau menyusuli surat kembali ke Sekda dan BPKAD serta Bupati Kepulauan Tanimbar.

- g. Ditjen Perikanan Budi Daya : LHP Manajemen Aset 2005-2007, temuan Pelaksanaan Ruislag Tanah Tambak Milik Ditjen Perikanan Budidaya di Desa Segoro Tambak Jatim Seluas 472.440m<sup>2</sup> Berlarut-larut dan Berpotensi Merugikan Negara Senilai Rp1.414.023.000,00 dengan rekomendasi BPK menyarankan agar Dirjen Perikanan Budidaya menginstruksikan kepada Seditjen Perikanan Budidaya untuk meneliti kembali proses ruislag tanah dimaksud, apabila dilanjutkan supaya mempertimbangkan harga tanah saat ini. Hasil telaahan Tim BPK, proses negosiasi penggantian ruislag masih berlanjut dan belum final. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut penyelesaian ruislag agar dilanjutkan negosiasi dengan kuasa hukum PT. Semeru Cemerlang didampingi oleh Biro Hukum KKP dan untuk merevaluasi nilai ruislag tersebut dengan harga sekarang.
- h. Ditjen PDSPKP : LHP Manajemen Aset 2005-2007, temuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Senilai Rp39.804.934.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan dengan temuan BPK menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan agar mengajukan persetujuan kepada Menteri Keuangan atas pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan atas persetujuan tersebut kemudian dibuat perjanjian kerjasama yang memuat klausul mengenai besarnya kontribusi tetap yang harus dibayar setiap tahun ke Kas Negara dan pembagian keuntungan hasil kerjasama serta sanksi yang jelas dan tegas apabila terjadi wanprestasi. Hasil telaahan Tim BPK, belum ada penjelasan tertulis dari eselon I terkait dan reuiu Itjen atas usulan penghapusan BMN di Pasar Ikan Hias (PIH) Pejompongan. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk dilengkapi surat dari KKP ke Kemenkeu, surat balasan dari Kemenkeu ke KKP atas usulan hibah BMN kepada DKI Jakarta, Reuiu Itjen terbaru, serta Surat Menteri Keuangan kepada Presiden Republik Indonesia nomor S-1032/MK.06/2024 tanggal 7 November

2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- i. BPPMHKP : LK TA 2019, temuan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker terkait: 1) Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melengkapi persetujuan sewa BMN pada PIM Muara Baru; 2) Melakukan Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya; 3) Melakukan perbaikan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN atas saldo yang bernilai negatif; 4) Segera melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah dan IMB atas bangunan; 5) Berkoordinasi dengan KPKNL untuk menghapus KDP yang dihentikan penggunaannya; dan 6) Menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP pada satker inaktif. Hasil telaahan Tim BPK, Tindak Lanjut yang disampaikan berupa SK Penghapusan, sedangkan dokumen lain belum ditindaklanjuti yaitu: 1.b. Bukti Surat Persetujuan Pengelola Barang. 2.b. Bukti hasil Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya pada DKP Provinsi Sumatera Selatan; dan 2.c. Bukti Perbaikan pada SIMAK BMN DKP Provinsi Sumatera Selatan. 3. Perbaikan pencatatan aplikasi yg bernilai negatif (screenshot aplikasi dan nilai minusnya atau file excelnya) 4. Agar dibuatkan matriks kepemilikan tanah dan IMB 5. Matriks rincian SK penghapusan KDP yang dihentikan penggunaannya per satker 6. Matriks rincian BAST hibah untuk satker DK dan TP Sehingga belum sesuai rekomendasi. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk dibuat kertas kerja untuk IMB gedung dan bangunan (keseluruhan yg sudah, belum dan tidak bisa diterbitkan), sehingga tidak perlu diusulkan TPTD.
3. Terhadap rekapitulasi hasil rekonsiliasi data dan pembahasan TLRHP BPK-RI pada Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan secara terlampir dan dapat diunduh pada link berikut <https://bit.ly/DataRekonTWEmpat2024> .
4. Dimohon bantuan Saudara untuk mendorong pemenuhan bukti tindak lanjut pada masing-masing mitra Eselon I, serta penyelesaian terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

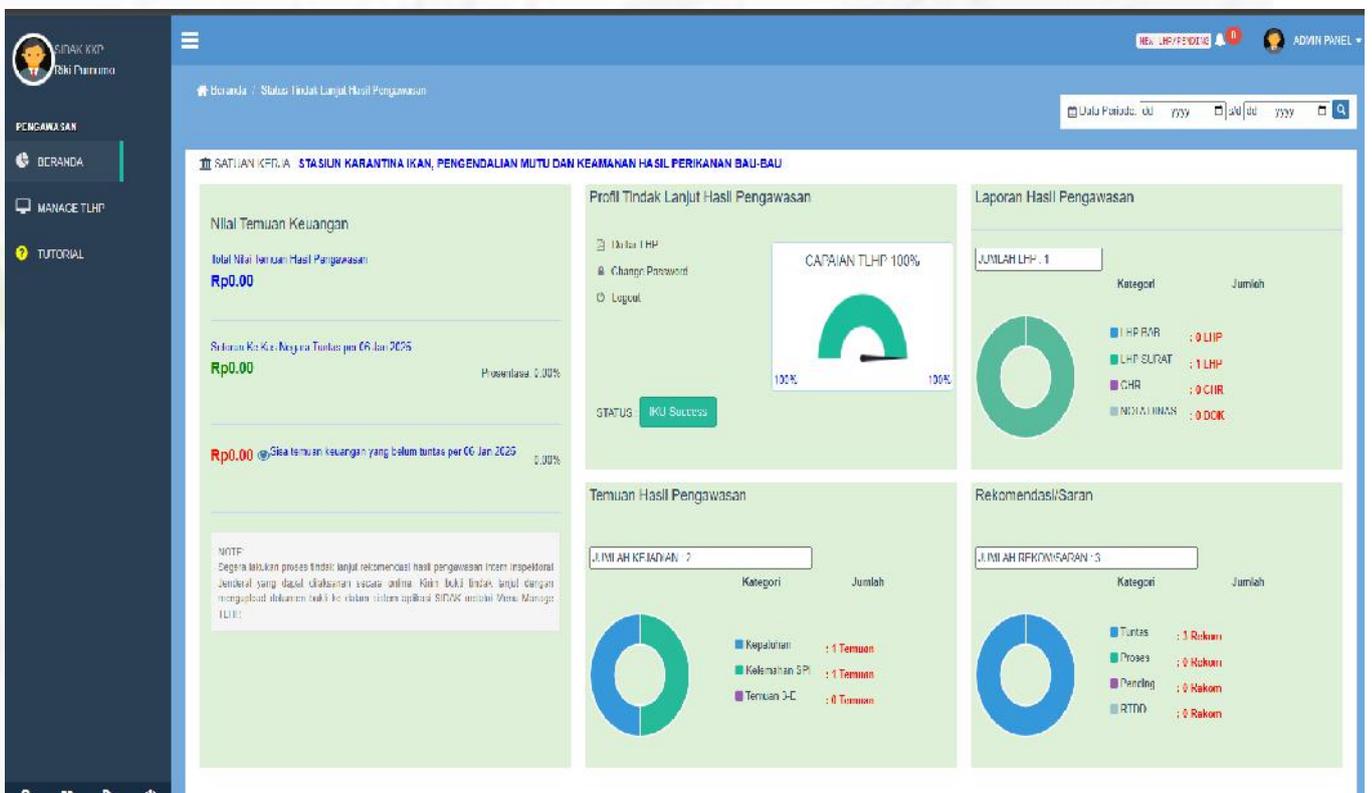
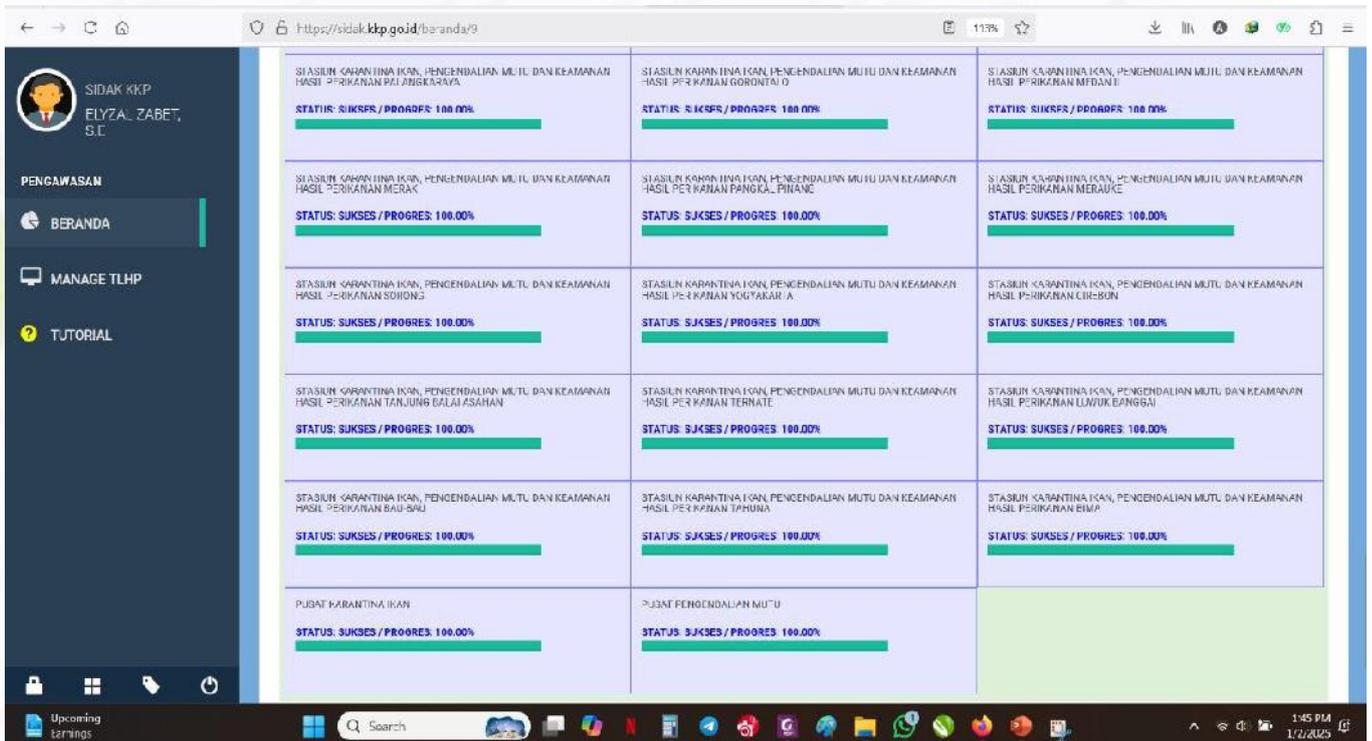


Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:  
Inspektur Jenderal

Lampiran 12. Bukti Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau



Lampiran 13. Bukti Dukung Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Baubau



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [itjen@kkp.go.id](mailto:itjen@kkp.go.id)

Nomor : B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 10 Desember 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka  
Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan  
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)  
Tahun 2024 lingkup BPPMHKP

Yth. Sekretaris BPPMHKP  
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagaimana Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.485/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 28 November 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian Efektivitas Pengawasan PBJ Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2024, terhadap 3 (tiga) komponen, dan memperoleh nilai **91,98%** dari maksimum 100%. Hasil penilaian tersebut telah melebihi target Indikator Kinerja (IK) 8 pada Perjanjian Kinerja (PK) Itjen KKP Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP, serta IK 7 pada PK Inspektorat IV Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat IV, dengan target masing-masing sebesar 82%. Rincian penilaian efektifitas pelaksanaan pengawasan PBJ disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20,00
2	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40,00
3	Nilai Rata-rata Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP	40	31,98
<b>Hasil Penilaian</b>		<b>100</b>	<b>91,98</b>

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 1 terdapat pada Lampiran 1.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

2. Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **84,34%** dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu pada IK 28, dengan target 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
<b>Hasil Penilaian</b>		<b>100</b>	<b>84,34</b>

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 2 terdapat pada Lampiran 2.

Meskipun telah melebihi target IK pada PK, namun berdasarkan penilaian lebih lanjut terhadap pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

**1. Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP**

Rencana PBJ yang telah di-*input* pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per Triwulan III Tahun 2024 hanya 2.777 Paket PBJ, senilai Rp184.082.331.000, atau 99,32% dari total 2.788 Paket PBJ yang harus di-*input* di SIRUP senilai Rp185.343.009.000,00.

**2. Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan dan pembayaran**

**a. Belanja Modal**

Terdapat 2 (dua) paket PBJ senilai Rp256.777.989,00, dari total 14 paket PBJ senilai total Rp2.020.603.696,00 yang terlambat penyelesaian pekerjaannya dan belum terdapat realisasi pembayaran pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud, yaitu:

- 1) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)/PPMHKP Padang senilai Rp85.943.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024; dan

2) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data senilai Rp161.180.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024.

b. Belanja Barang/Jasa

Terdapat 1 (satu) paket PBJ senilai Rp120.900.000,00, dari total 95 paket PBJ senilai total Rp10.612.011.998,00, yang terlambat pembayarannya pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud bernomor B.216.C/PPK-BPPMHKP.3/PL.420/XI/2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa *Fullboard* oleh PT. Citra Cikopo Hotel, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 26 November 2024.

Rincian PBJ (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa) dapat diakses pada: <https://docs.google.com/document/d/1xNYHbgXt8Jkjo7gP4ESb5RQJga0IQcuH/edit?usp=sharing&oid=101693255689536754273&rtpof=true&sd=true>.

3. **Belum seluruh hasil pengadaan sesuai *volume***

Berdasar hasil pengawasan Itjen KKP terhadap PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui terdapat kekurangan *volume* hasil PBJ, yaitu:

- a. Pada Balai KIPM/PPMHKP Semarang, sesuai Surat Tugas Nomor B.358/ITJ.4/KP.440/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV. Bangun Jaya, dengan kekurangan *volume* senilai Rp4.055.472,00;
- b. Pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya sesuai Surat Tugas Nomor B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 21 November 2024, terdapat:
  - 1) Pemeliharaan Kantor (perbaikan *plafond* dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, senilai Rp14.430.000,00 oleh CV. Tata Bangun Konstruksi, dengan kekurangan *volume* senilai Rp913.000,00; dan
  - 2) Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024, senilai Rp10.295.250,00, oleh CV. Seribu Dinar, dengan kekurangan *volume* senilai Rp875.000,00.

Berdasarkan konfirmasi dengan Analis Perencanaan, serta Ketua Tim Kerja (Katimja) Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Internal (PI) pada Sekretariat BPPMHKP, belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP belum melakukan revisi RUP secara berkala setelah dilaksanakan revisi anggaran. Sedangkan keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan terjadi karena kekurangcermatan KPA dan PPK dalam mengendalikan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada Saudara agar menginstruksikan tertulis, kepada:

1. Seluruh KPA Satker lingkup BPPMHKP agar tertib dalam mengumumkan rencana pengadaan pada SIRUP dan menyelesaikan PBJ sesuai kontrak/surat pesanan tepat waktu; dan
2. PPK pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya dan Balai KIPM/PPMHKP Semarang agar cermat dalam mengendalikan kontrak dan segera menindaklanjuti rekomendasi Itjen KKP terkait kekurangan *volume* pada hasil pengawasan PBJ.

Terhadap saran di atas, telah terdapat kesanggupan tindak lanjut pada Minggu ke-3 Desember 2024, sesuai Dokumen Hasil Penilaian dan Kesanggupan Tindak Lanjut yang ditandatangani Katimja Keuangan, BMN dan PI per 4 Desember 2024 dan dapat diakses pada: [https://drive.google.com/file/d/1DxozTWpFuUh-M6E8T\\_IPIUfXRvkOROnj/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1DxozTWpFuUh-M6E8T_IPIUfXRvkOROnj/view?usp=sharing)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal  
Inspektur IV,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur II
3. Kepala BPPMHKP

Lampiran 14. Bukti Dukung Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM  
Baubau



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

Nomor : B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 03 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Hal : Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN  
Lingkup BPPMHKP Tahun 2024

Yth.  
Kepala UPT Lingkup BPPMHKP  
di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor T.553/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
  - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)
  - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
  - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
  - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
  - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara umum mencapai dari target 80,00 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, dan  
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi

Lampiran I  
 Nomor : B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025  
 Tanggal : 31 Desember 2024

**Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Pusat Manajemen Mutu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
2	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	80,00 %	97,50 %	Tercapai
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	80,00 %	97,50 %	Tercapai
4	Balai KIPM Jakarta II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
5	Balai Uji Standar KIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
6	Sekretariat BKIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Bandung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
8	Stasiun KIPM Cirebon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
9	Balai KIPM Semarang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Yogyakarta	80,00 %	97,50 %	Tercapai
11	Balai KIPM Surabaya I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
12	Balai KIPM Surabaya II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Aceh	80,00 %	97,50 %	Tercapai
14	Balai KIPM Medan I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Medan II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Padang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
18	Stasiun KIPM Pekanbaru	80,00 %	97,50 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Jambi	80,00 %	97,50 %	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palembang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
21	Balai KIPM Lampung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
22	Stasiun KIPM Pontianak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
23	Balai KIPM Entikong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
24	Stasiun KIPM Palangkaraya	80,00 %	97,50 %	Tercapai
25	Balai KIPM Banjarmasin	80,00 %	97,50 %	Tercapai
26	Balai KIPM Balikpapan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
27	Balai KIPM Manado	80,00 %	97,50 %	Tercapai
28	Stasiun KIPM Tahuna	80,00 %	97,50 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Palu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	80,00 %	97,50 %	Tercapai
31	Balai Besar KIPM Makasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
32	Stasiun KIPM Kendari	80,00 %	97,50 %	Tercapai
33	Stasiun KIPM Bau-bau	80,00 %	97,50 %	Tercapai
34	Balai KIPM Ambon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
35	Balai KIPM Denpasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
36	Balai KIPM Mataram	80,00 %	97,50 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Bima	80,00 %	97,50 %	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	80,00 %	97,50 %	Tercapai

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
39	Balai KIPM Jayapura	80,00 %	97,50 %	Tercapai
40	Stasiun KIPM Merauke	80,00 %	97,50 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Bengkulu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Ternate	80,00 %	97,50 %	Tercapai
43	Balai Besar KIPM Jakarta I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Merak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
45	Stasiun KIPM Pangkalpinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Gorontalo	80,00 %	97,50 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Batam	80,00 %	97,50 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tanjung Pinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
49	Stasiun KIPM Sorong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
50	Stasiun KIPM Mamuju	80,00 %	97,50 %	Tercapai
51	Balai KIPM Tarakan	80,00 %	97,50 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, dan  
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi